



**SEKRETARIAT**

**TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

**Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia**

Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110

Telp : 021-3912812

Faks : 021-3912-511 dan 021-391-2513

E-Mail : sekretariat@tnp2k.go.id

Website : www.wapresri.go.id



SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN





SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

# INDIKATOR KESEJAHTERAAN DAERAH **PROVINSI SULAWESI TENGAH**



TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Judul: Indikator Kesejahteraan Daerah  
Provinsi Sulawesi Tengah**

Disusun dan Diterbitkan oleh:  
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)

Cetakan Pertama, November 2011

Hak Cipta dilindungi Undang-undang.  
© 2011 Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)  
Foto Cover: [commons.wikimedia.org](https://commons.wikimedia.org), [perikanan-hangtuah.blogspot.com](http://perikanan-hangtuah.blogspot.com)

Korespondensi : Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan  
Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia  
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110  
Telp. 021-3912812  
Fax. 021-3912-511 dan 021-391-2513  
E-mail: [sekretariat@tnp2k.go.id](mailto:sekretariat@tnp2k.go.id)  
Website: [www.wapresri.go.id](http://www.wapresri.go.id)



## DAFTAR SINGKATAN

ADHK	: Atas Dasar Harga Konstan
AKB	: Angka Kematian Bayi Per 1.000 Kelahiran Hidup
APK	: Angka Partispasi Kasar
APM	: Angka Partisipasi Murni
BLM	: Bantuan Langsung Masyarakat
BPS	: Badan Pusat Statistik
CFSI	: <i>Composite Food Security Index</i>
DKP	: Dewan Ketahanan Pangan
FIA	: <i>Food Insecurity Atlas</i>
FSVA	: <i>Food Security and Vulnerability Atlas</i>
HDI	: <i>Human Development Index</i>
IPKM	: Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat
IPM	: Indeks Pembangunan Manusia
KUR	: Kredit Usaha Rakyat
MA	: Madrasah Aliyah
MI	: Madrasah Ibtidaiyah
MTS	: Madrasah Tsanawiyah
NTP	: Nilai Tukar Petani
PBB	: Perserikatan Bangsa Bangsa
PDRB	: Produk Domestik Regional Bruto
PNPM	: Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
Riskesdas	: Riset Kesehatan Dasar
SAKERNAS	: Survey Angkatan Kerja Nasional
SD	: Sekolah Dasar
SMA	: Sekolah Menengah Atas
SMK	: Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	: Sekolah Menengah Pertama
SUSENAS	: Survey Sosial Ekonomi Nasional
TNP2K	: Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
TPAK	: Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPT	: Tingkat Pengangguran Terbuka
WFP	: <i>World Food Programme</i>



## DAFTAR ISI

Daftar Singkatan.....	<b>iii</b>
Daftar Isi.....	<b>iv</b>
Daftar Tabel .....	<b>v</b>
Daftar Gambar.....	<b>vi</b>
Pertumbuhan Ekonomi.....	<b>1</b>
Inflasi.....	<b>4</b>
Nilai Tukar Petani.....	<b>5</b>
Tingkat Kemiskinan .....	<b>6</b>
Indikator Kemiskinan .....	<b>7</b>
Program Penanggulangan Kemiskinan .....	<b>8</b>
Tingkat Pengangguran dan Ketenagakerjaan.....	<b>9</b>
Bidang Kesehatan .....	<b>11</b>
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat.....	<b>15</b>
Bidang Pendidikan.....	<b>17</b>
Akses Terhadap Air Bersih .....	<b>19</b>
Akses Terhadap Sanitasi.....	<b>20</b>
Indeks Pembangunan Manusia.....	<b>21</b>
Komponen Indeks Pembangunan Manusia .....	<b>22</b>
Ketahanan Pangan.....	<b>23</b>
Prioritas Bidang Pendidikan .....	<b>26</b>
Prioritas Bidang Kesehatan.....	<b>28</b>
Prioritas Bidang Infrastruktur Dasar .....	<b>31</b>
Prioritas Bidang Ketenagakerjaan .....	<b>34</b>
Bidang-Bidang Prioritas Kesejahteraan Rakyat .....	<b>35</b>
PNPM Mandiri.....	<b>36</b>
Kredit Usaha Rakyat (KUR) .....	<b>38</b>
Keuangan Daerah.....	<b>41</b>





## DAFTAR TABEL

- Tabel 1. Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 – 2010
- Tabel 2. Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008 – 2010 (Jiwa)
- Tabel 3. Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2008-2010 (Persen)
- Tabel 4. Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010
- Tabel 5. Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010
- Tabel 6. Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 7. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 8. Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 9. Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2008 - 2009
- Tabel 10. Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Tabel 11. Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota
- Tabel 12. Komposisi BLM PNPM Mandiri Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2011



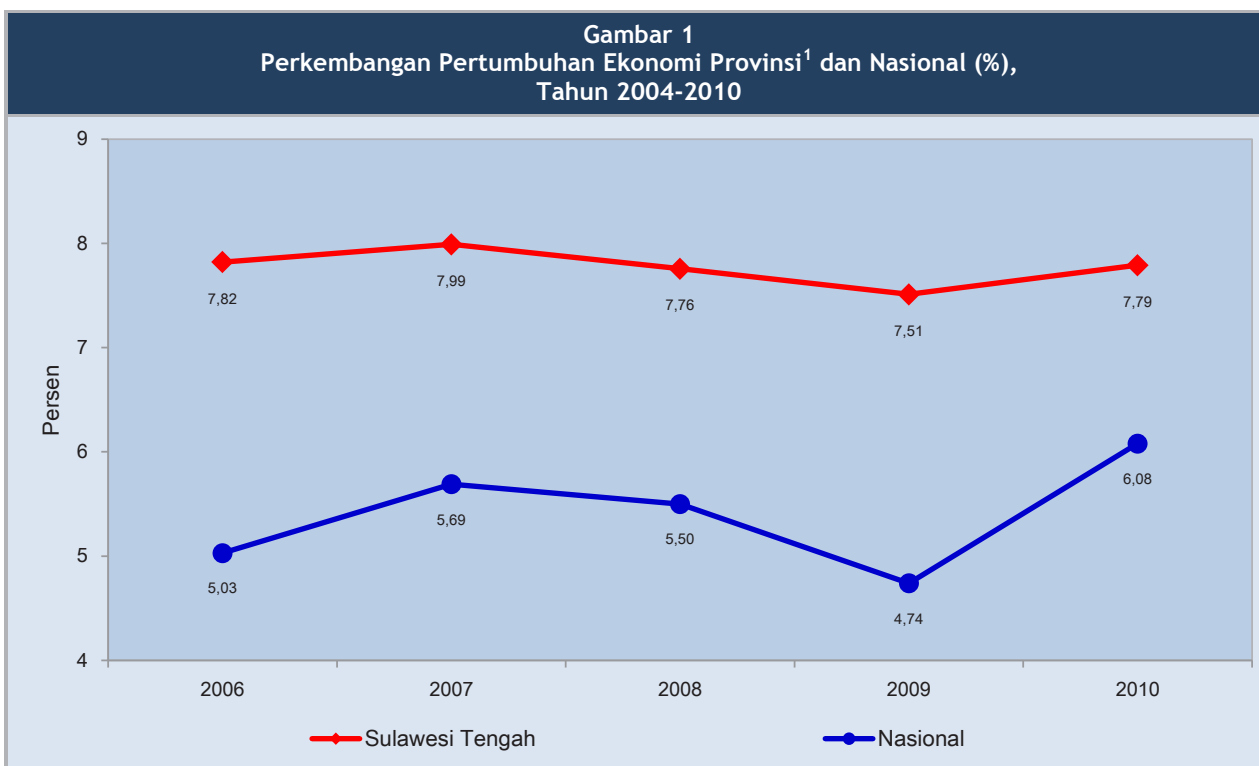
## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi dan Nasional (%), Tahun 2006-2010
- Gambar 2. Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 3. Rata-rata Upah/Gaji/Pendapatan Buruh/Karyawan/Pegawai Sebulan Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 4. Perkembangan Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Provinsi Sulawesi Tengah (%), Tahun 2010-2011
- Gambar 5. Inflasi Tahunan (Year-on-Year) Menurut 66 Kota Besar di Masing-masing Provinsi (%), (Bulan Juli 2011)
- Gambar 6. Perkembangan Nilai Tukar Petani (Year-on-Year) Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2008-2011
- Gambar 7. Nilai Tukar Petani Menurut Provinsi (%), Bulan Juli 2011
- Gambar 8. Tingkat Kemiskinan Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 9. Tingkat Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 10. Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010 dan Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota
- Gambar 11. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Provinsi (%), Tahun 2010
- Gambar 12. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2010
- Gambar 13. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Provinsi, Tahun 2010
- Gambar 14. Persentase Balita Kekurangan Gizi Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2007
- Gambar 15. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Provinsi (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 16. Angka Kematian Bayi (AKB) Per 1000 Kelahiran Hidup Menurut Kabupaten/Kota (Jiwa), Tahun 2009
- Gambar 17. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 18. Persentase Kelahiran Ditolong oleh Tenaga Medis Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 19. Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) Tahun 2009
- Gambar 20. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 21. Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 22. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Provinsi (%), Tahun 2009
- Gambar 23. Proporsi Rumah Tangga Dengan Akses Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 24. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Provinsi (%), Tahun 2009

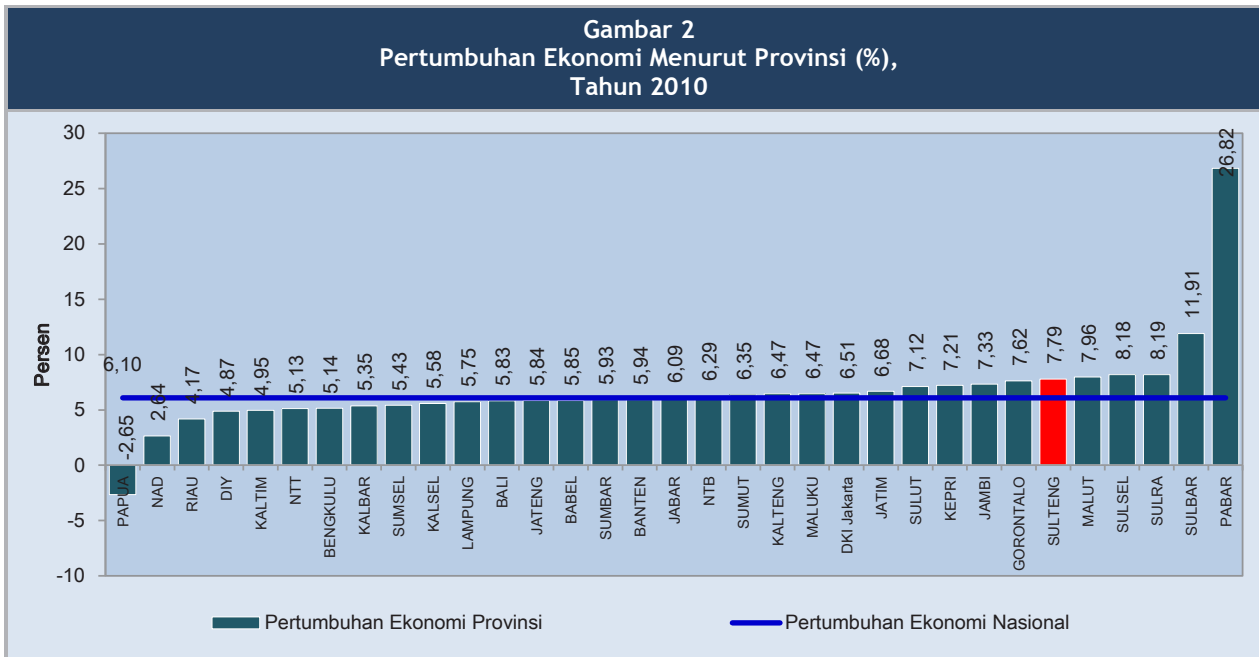
- Gambar 25. Proporsi Rumah Tangga Tanpa Akses Sanitasi Menurut Kabupaten/Kota (%), Tahun 2009
- Gambar 26. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Provinsi, Tahun 2009
- Gambar 27. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 28. Konsumsi Normatif terhadap Produksi Bersih Serealia per Kapita Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 29. Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009
- Gambar 30. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun
- Gambar 31. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Sekolah Dasar (SD/MI)
- Gambar 32. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama
- Gambar 33. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Kematian Bayi
- Gambar 34. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Prevalensi Balita Kekurangan Gizi
- Gambar 35. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Air Bersih
- Gambar 36. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Sanitasi
- Gambar 37. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Akses Terhadap Listrik
- Gambar 38. Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Meningkatkan Kesempatan Kerja
- Gambar 39. Komposisi BLM PNPM Mandiri Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2011
- Gambar 40. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR di Provinsi Sulawesi Tengah, 2010 - 2011
- Gambar 41. Perkembangan Rencana, Realisasi Penyaluran Kredit dan Jumlah Debitur KUR Nasional, 2010 - 2011
- Gambar 42. Jumlah Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang Terserap Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 43. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Provinsi (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 44. Jumlah Kredit Terserap Per-Debitur Menurut Bank Penyalur (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 45. Komposisi Kredit yang Terserap Menurut Bank Penyalur Provinsi Sulawesi Tengah (Juta Rupiah) (Per 31 Juli 2011)
- Gambar 46. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi, Provinsi Sulawesi Tengah (Juta Rupiah), Tahun 2010
- Gambar 47. Komposisi Alokasi Belanja Daerah Menurut Fungsi dan Kabupaten/Kota, Provinsi Sulawesi Tengah, Tahun 2010



# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

<sup>1</sup> Pertumbuhan ekonomi tahun 2009 merupakan angka sementara dan tahun 2010 merupakan angka sangat sementara.

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 1.

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha, Tahun 2008 - 2010

LAPANGAN USAHA	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (Triliun Rupiah)			PDRB Atas Dasar Harga Konstan ADHK 2000 (Triliun Rupiah)			Pertumbuhan Ekonomi ADHK 2000 (Persen)		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pertanian	11,90	13,23	14,51	6,13	6,65	7,05	4,61	6,00	6,31
Pertambangan Dan Penggalian	1,17	1,31	1,48	0,54	0,57	0,60	19,06	5,69	10,81
Industri Pengolahan	2,11	2,55	2,81	0,94	1,04	1,11	6,39	6,21	8,44
Listrik, Gas & Air Bersih	0,18	0,22	0,24	0,11	0,12	0,13	1,92	5,18	11,10
Bangunan	1,76	2,12	2,48	0,98	1,09	1,20	8,61	10,29	8,00
Perdagangan, Hotel & Restoran	3,35	3,84	4,44	1,89	2,08	2,29	6,41	9,95	8,12
Pengangkutan & Komunikasi	1,95	2,32	2,64	1,09	1,23	1,33	11,78	8,81	10,12
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	1,28	1,51	1,77	0,69	0,77	0,85	10,74	10,65	8,69
Jasa - Jasa	4,46	5,30	6,48	2,38	2,64	2,89	12,97	9,46	8,02
<b>Produk Domestik Regional Bruto</b>	<b>28,15</b>	<b>32,40</b>	<b>36,86</b>	<b>14,74</b>	<b>16,18</b>	<b>17,44</b>	<b>7,76</b>	<b>7,51</b>	<b>7,79</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

Tabel 2.

Distribusi Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama, Tahun 2008-2010 (Jiwa)

LAPANGAN USAHA	2008	2009	2009	2010	2010
	Agustus	Februari	Agustus	Februari	Agustus
Pertanian	671.102	678.632	679.713	703.788	663.609
Industri Pengolahan	49.795	61.118	43.919	51.407	38.419
Bangunan	45.268	32.846	43.459	44.063	43.076
Perdagangan, Hotel & Restoran	156.175	177.136	161.420	187.269	164.156
Pengangkutan & Komunikasi	44.137	47.393	45.069	39.167	44.241
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	5.659	11.496	6.668	9.792	8.150
Jasa - Jasa	148.253	157.077	155.097	165.237	174.634
Lainnya*	10.299	7.390	14.371	23.256	27.941
<b>Jumlah</b>	<b>1.130.687</b>	<b>1.173.089</b>	<b>1.149.718</b>	<b>1.223.979</b>	<b>1.164.226</b>

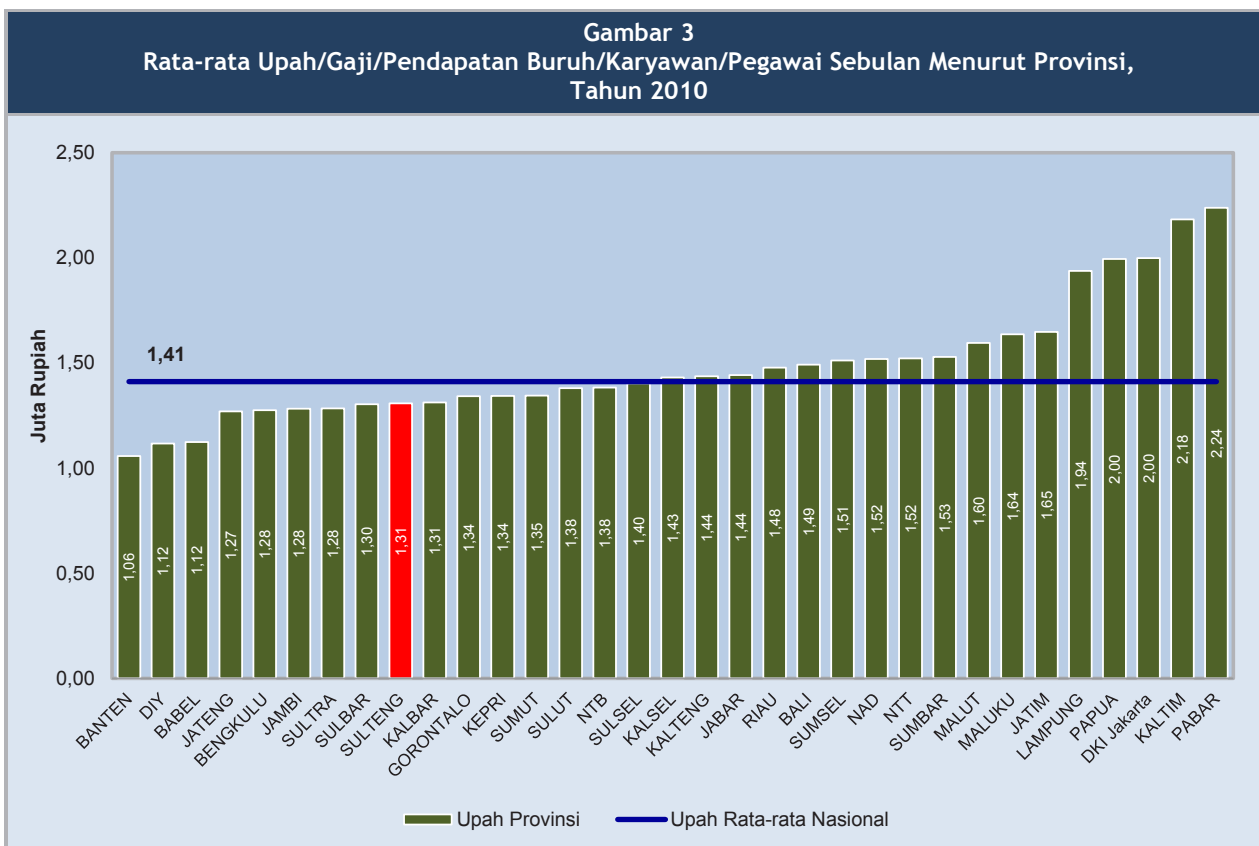
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

# PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Tabel 3.  
Kontribusi Masing-masing Sektor Terhadap PDRB dan Penyerapan Tenaga Kerja, Tahun 2009-2010 (Persen)

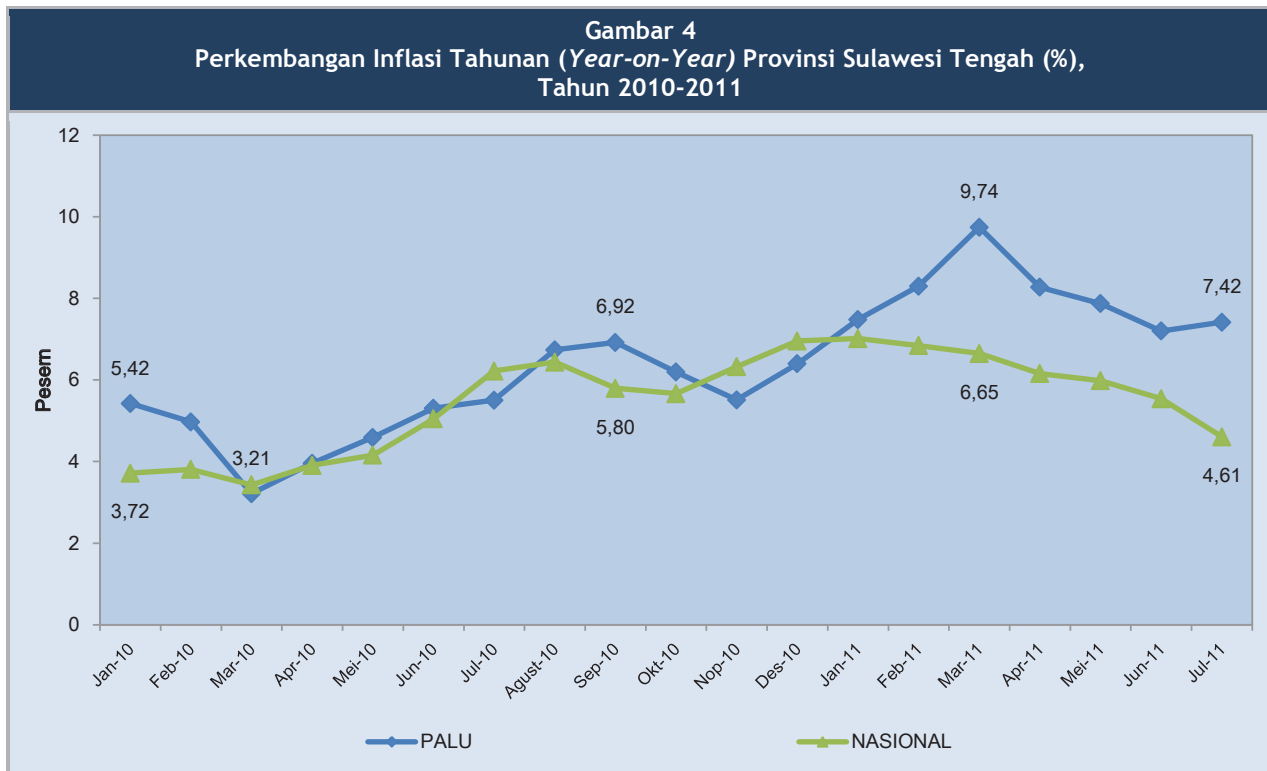
LAPANGAN USAHA	Distribusi PDRB (ADHK 2000)			Distribusi Tenaga Kerja		
	2008	2009	2010	2008	2009	2010
Pertanian	41,57	41,12	40,44	59,35	59,12	57,00
Industri Pengolahan	6,40	6,45	6,35	4,40	3,82	3,30
Bangunan	6,65	6,72	6,88	4,00	3,78	3,70
Perdagangan. Hotel & Restoran	12,78	12,86	13,12	13,81	14,04	14,10
Pengangkutan & Komunikasi	7,39	7,57	7,64	3,90	3,92	3,80
Keuangan. Persewaan & Jasa Perusahaan	4,69	4,74	4,86	0,50	0,58	0,70
Jasa - Jasa	16,16	16,30	16,55	13,11	13,49	15,00
Lainnya*	4,36	4,23	4,15	0,91	1,25	2,40

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

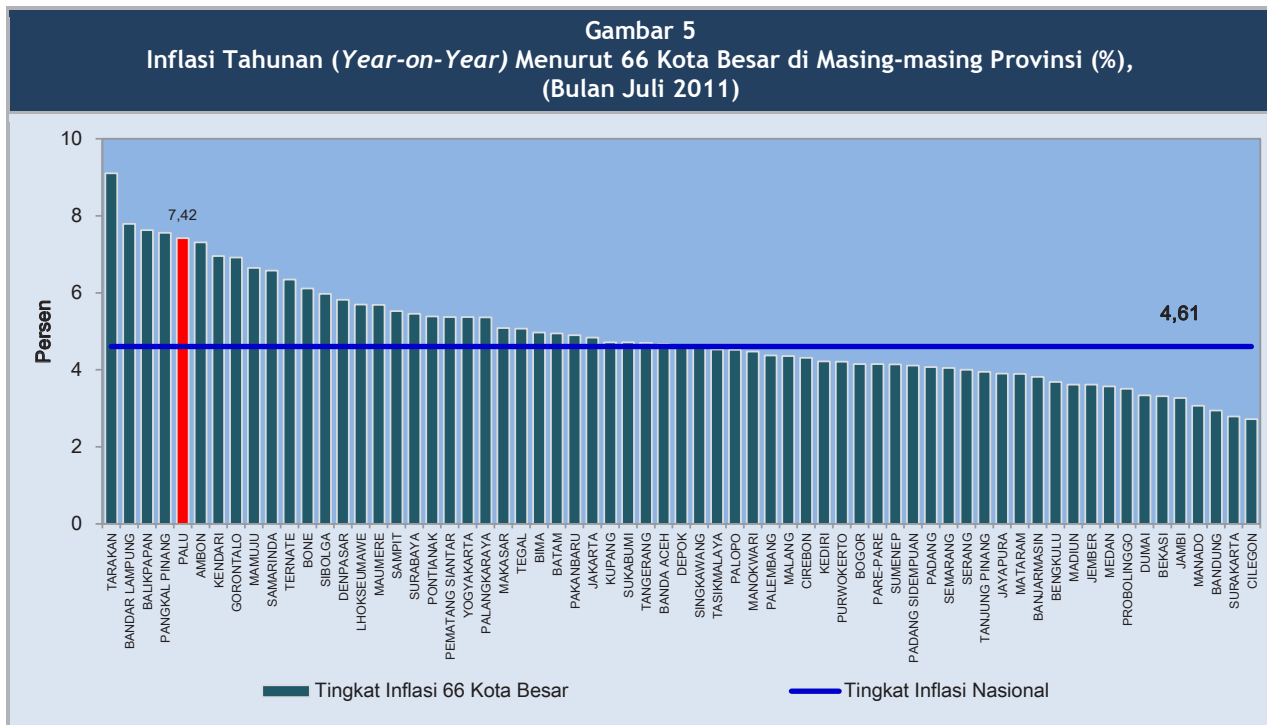


Sumber: Keadaan Pekerja di Indonesia, BPS 2011

# INFLASI



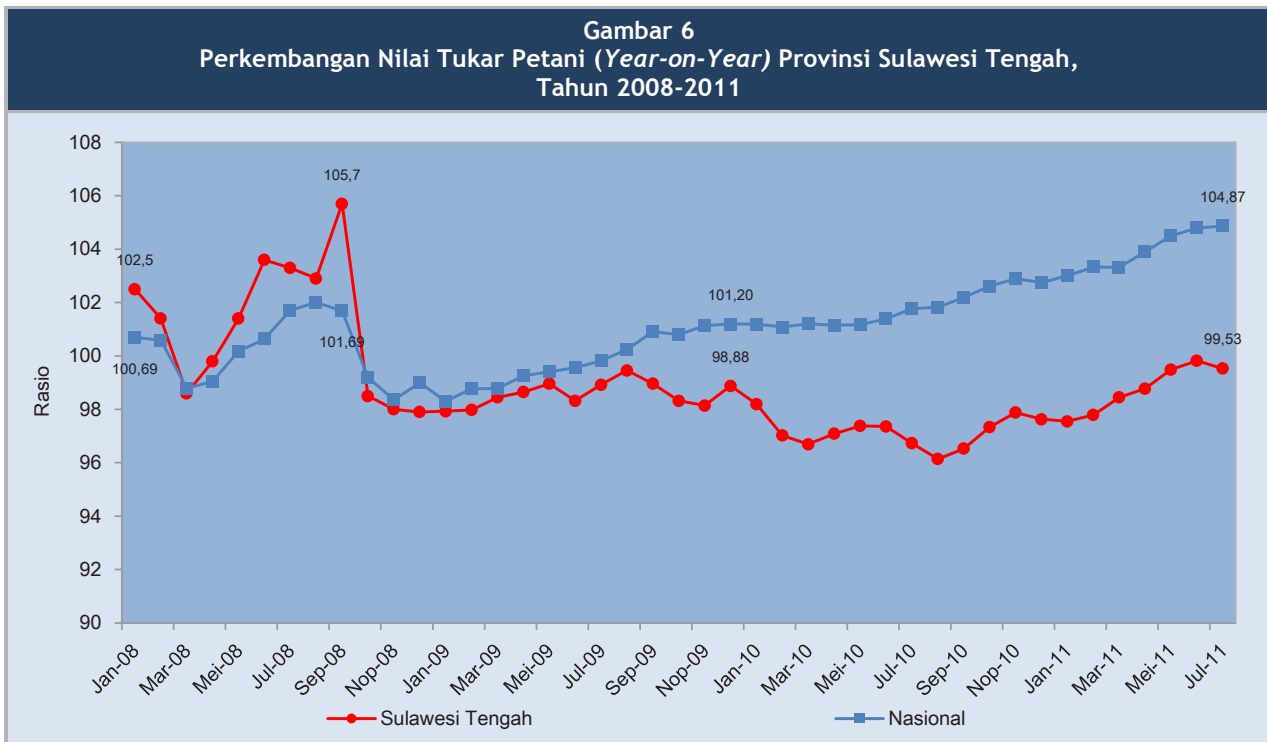
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



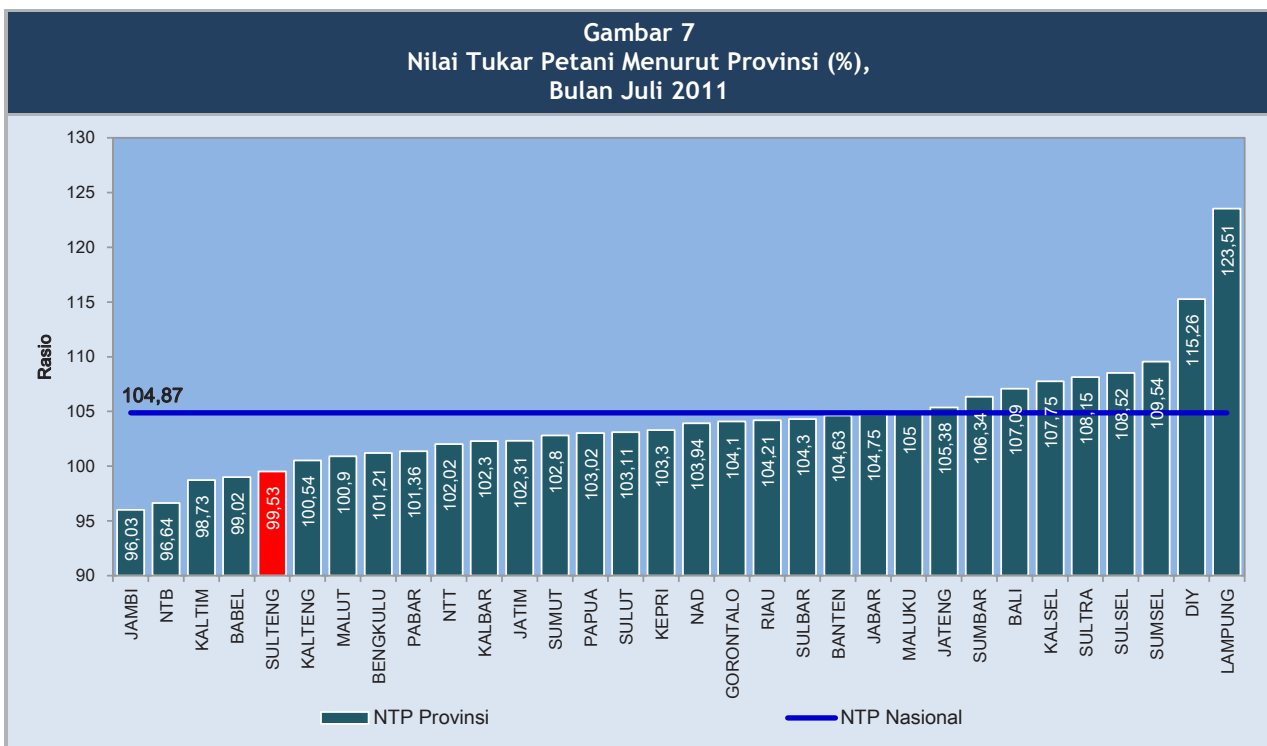
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



# NILAI TUKAR PETANI

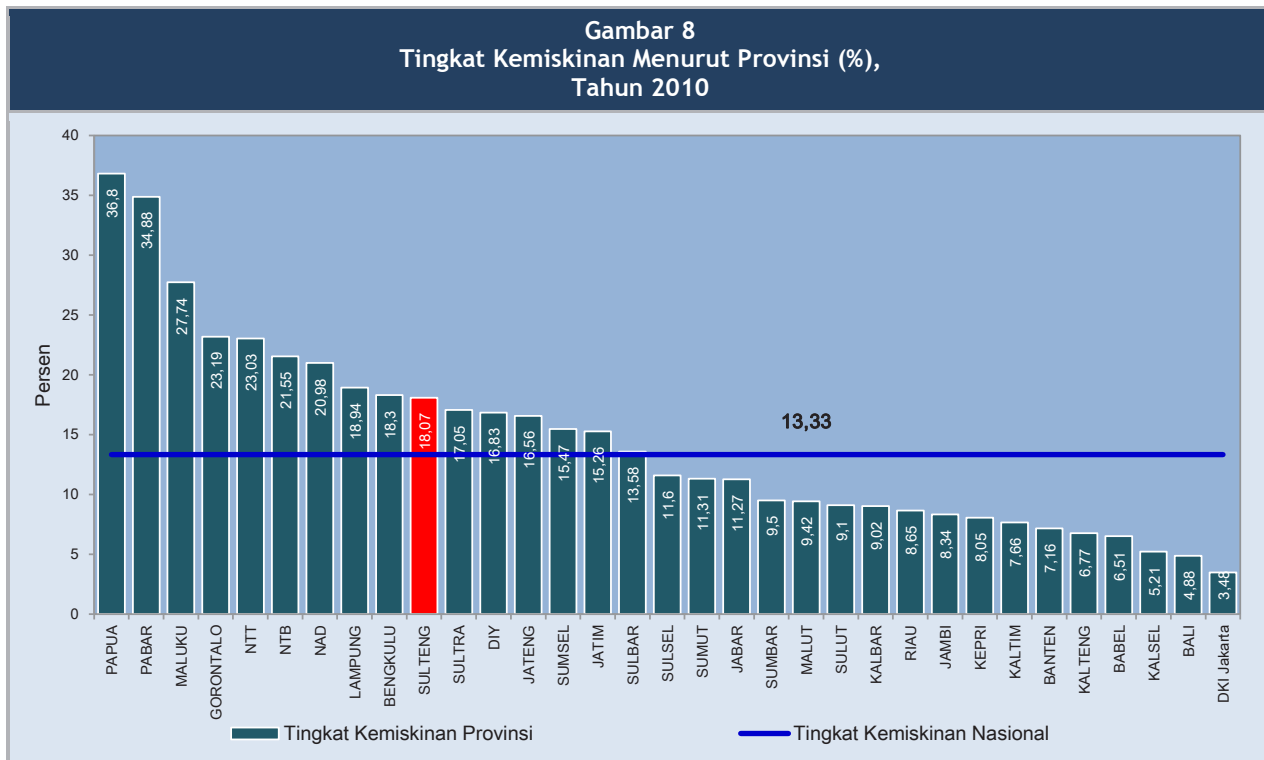


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

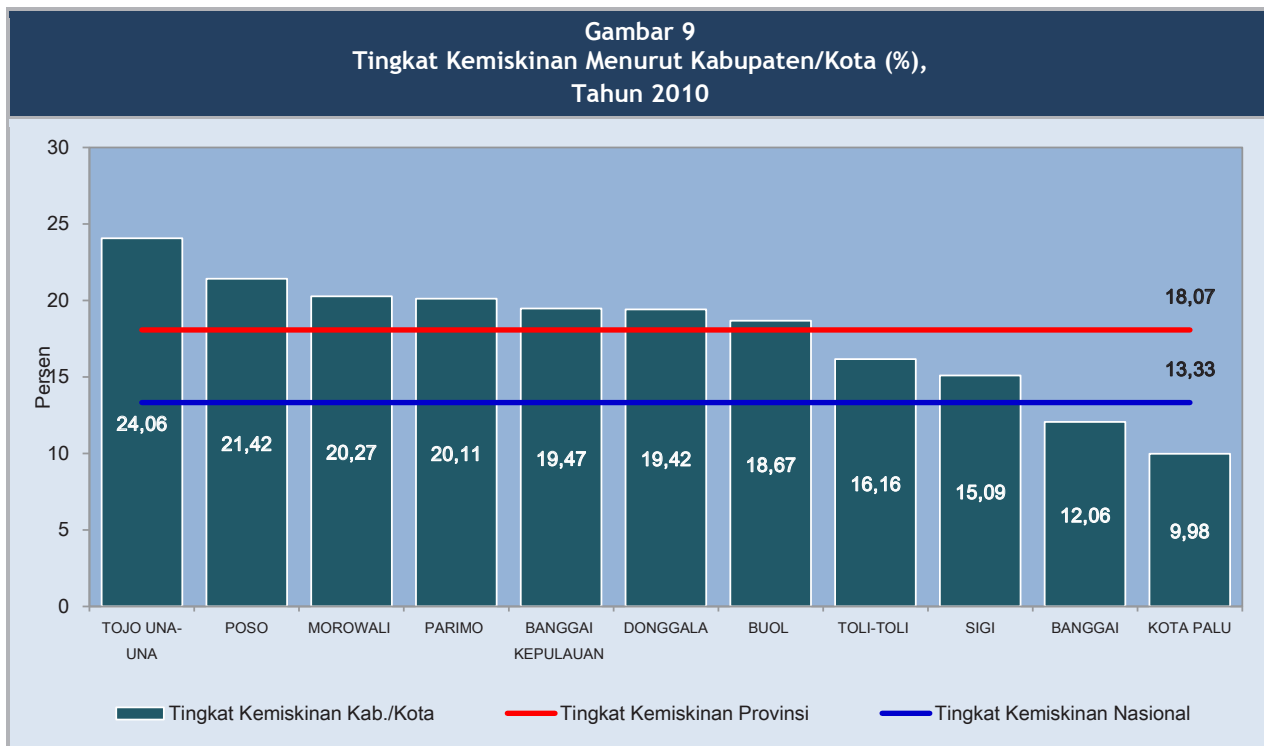


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

# TINGKAT KEMISKINAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

## INDIKATOR KEMISKINAN

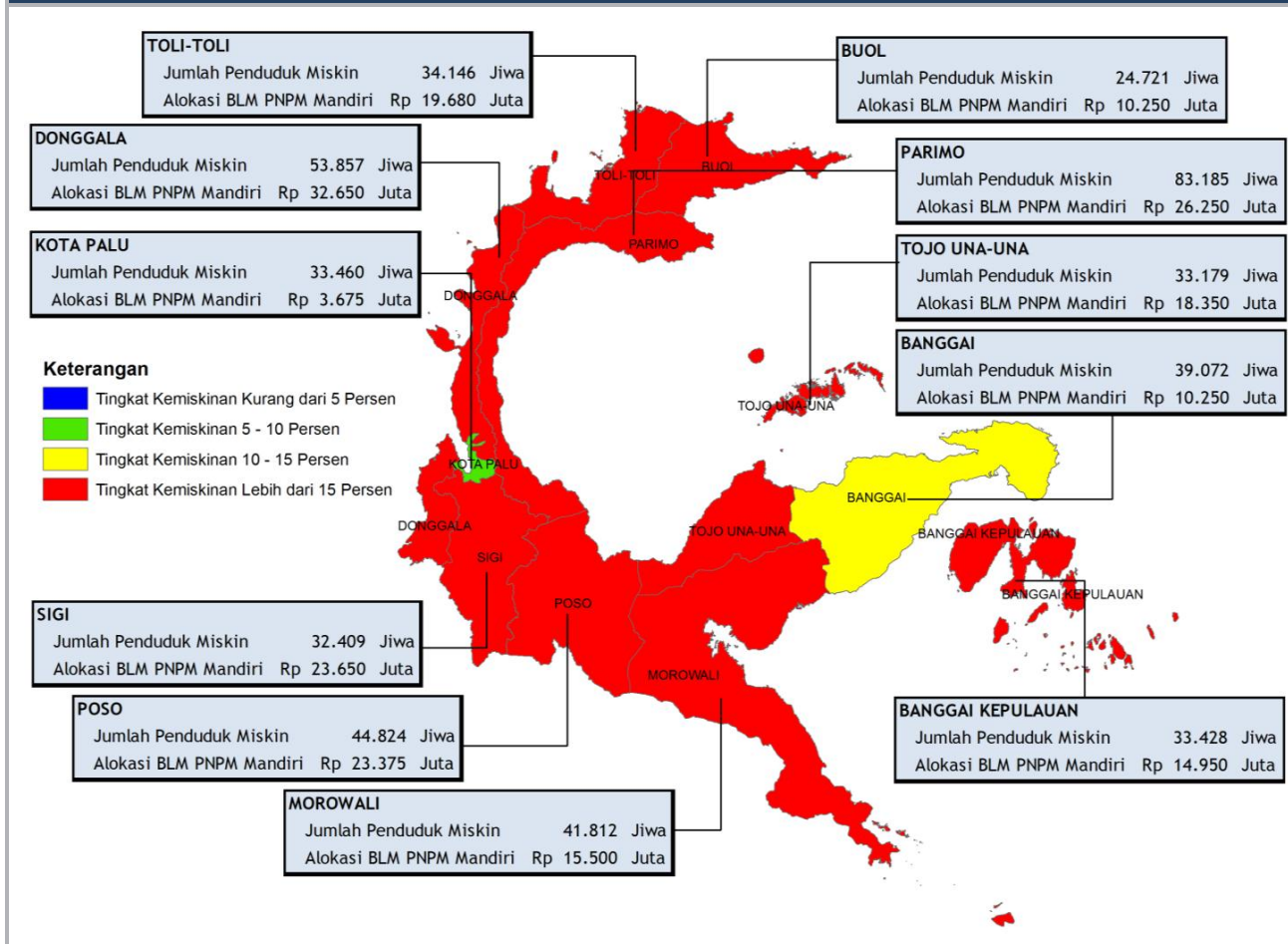
Tabel 4.  
Indikator Kemiskinan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009-2010

Daerah	Garis Kemiskinan (Rp/Bulan)		Presentase Penduduk Miskin (%)		Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)	
	2009	2010	2009	2010	2009	2010
BANGGAI KEPULAUAN	182 783	200 360	21,99	19,47	36 088	33 428
BANGGAI	207 199	227 124	14,60	12,06	45 333	39 072
MOROWALI	226 762	248 568	22,53	20,27	42 344	41 812
POSO	239 875	262 942	23,29	21,42	41 586	44 824
DONGGALA	173 004	189 640	18,91	19,42	94 340	53 857
TOLI-TOLI	173 876	190 596	17,83	16,16	37 410	34 146
BUOL	186 798	204 761	20,68	18,67	25 735	24 721
PARIMO	211 586	231 933	19,72	20,11	77 871	83 185
TOJO UNA-UNA	234 677	257 244	26,23	24,06	52 305	33 179
SIGI	-	192 044	-	15,09	-	32 409
KOTA PALU	266 407	292 025	9,19	9,98	30 106	33 460
SULAWESI TENGAH	189 653	203 237	18,98	18,07	483 118	454 092
INDONESIA	200 262	211 726	14,15	13,33	32.530.000	31.023.390

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan hasil Susenas Kor Juli 2010)

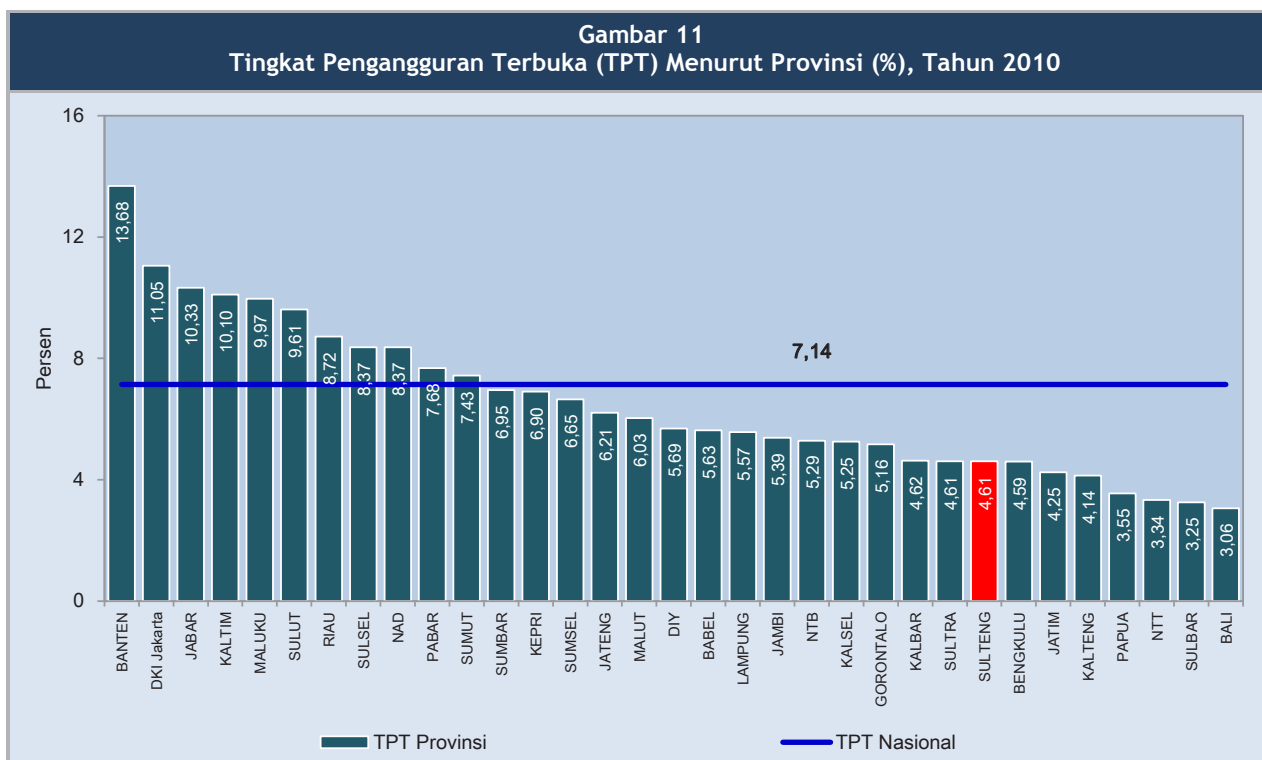
# PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

**Gambar 10**  
**Tingkat Kemiskinan, Jumlah Penduduk Miskin Tahun 2010,**  
**Alokasi BLM PNPM Mandiri Tahun 2011 Menurut Kabupaten Kota**

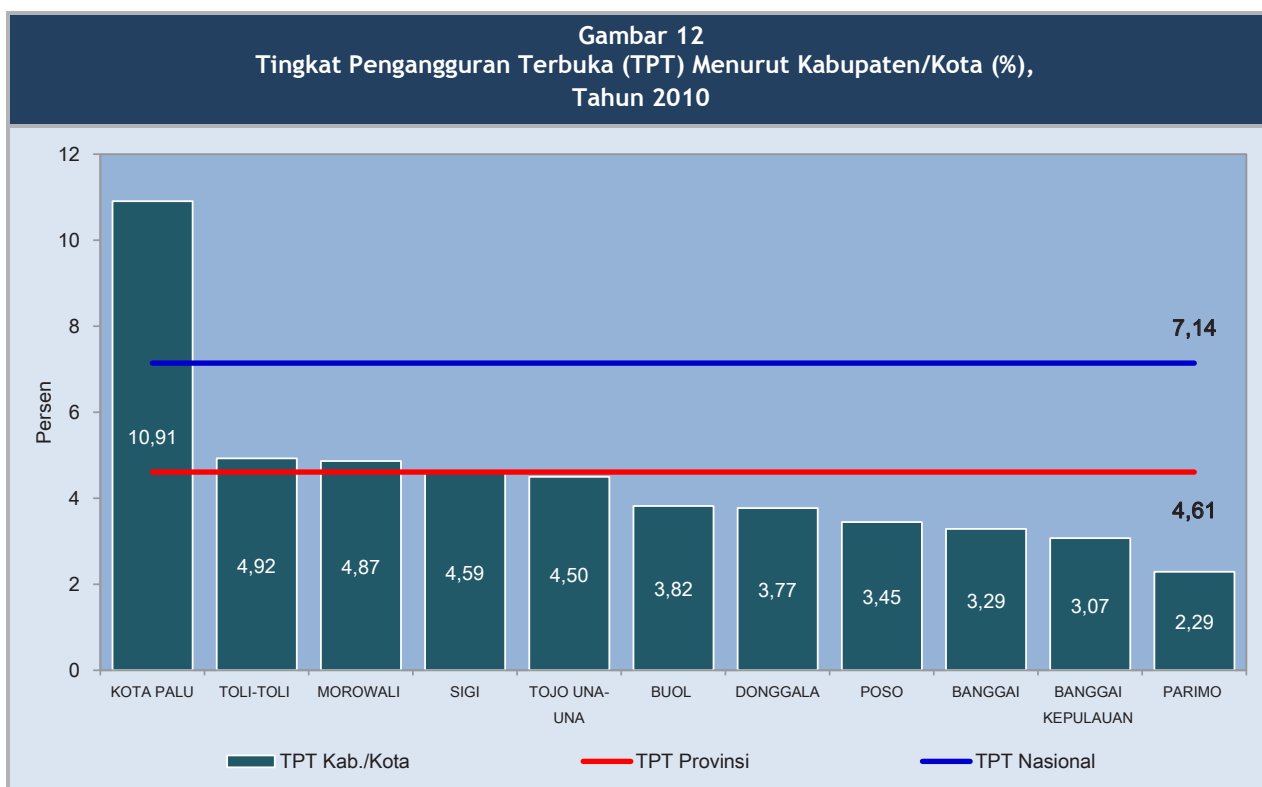


Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011  
 Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011

# TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

## TINGKAT PENGANGGURAN DAN KETENAGAKERJAAN

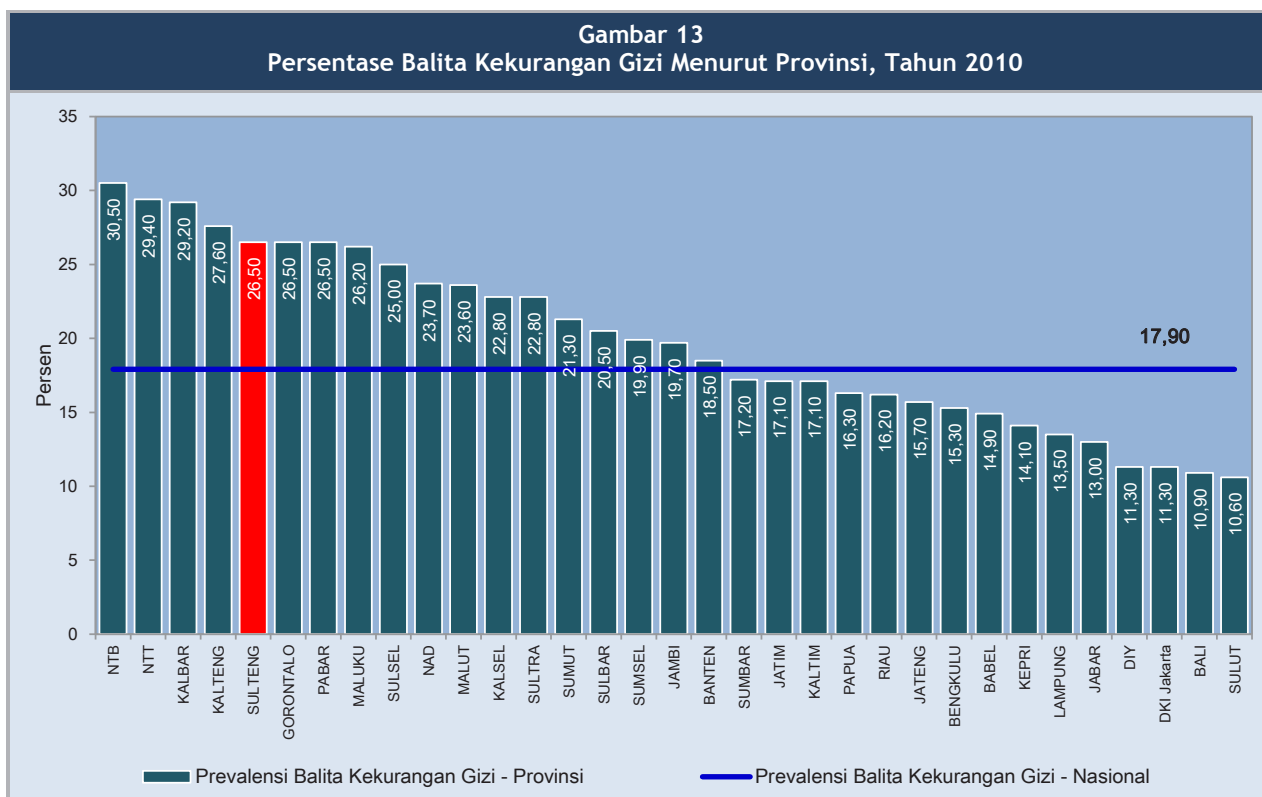
Tabel 5.  
Indikator Ketenagakerjaan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009 dan 2010

Daerah	Angka Partisipasi Angkatan Kerja		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 14 Jam Seminggu		Pekerja yang Bekerja Selama Kurang dari 35 Jam Seminggu		Pekerja di Sektor Informal	
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010
BANGGAI KEPULAUAN	73,52	73,08	6,09	6,33	52,17	43,62	84,63	81,44
BANGGAI	72,23	65,26	3,83	3,07	27,83	32,51	75,55	72,31
MOROWALI	69,91	71,36	7,51	6,28	43,98	43,82	74,27	71,48
POSO	67,98	68,82	3,91	4,15	42,48	35,12	75,75	71,18
DONGGALA	68,61	70,20	6,87	9,55	54,29	57,41	81,03	79,91
TOLI-TOLI	61,90	61,45	4,72	6,24	26,17	33,65	65,29	65,05
BUOL	64,26	61,77	2,25	2,28	27,99	23,18	69,10	63,27
PARIMO	76,94	73,58	8,09	8,31	42,53	46,27	79,64	79,38
TOJO UNA-UNA	74,51	77,79	8,06	9,75	38,42	43,59	73,15	74,26
SIGI	-	72,10	-	9,08	-	59,50	-	75,45
KOTA PALU	60,92	66,51	2,53	3,84	21,69	17,86	35,25	33,90
PALU	69,27	69,22	5,72	6,37	39,14	40,13	72,14	69,58
NASIONAL	67,23	67,72	4,29	4,11	30,10	30,75	61,56	58,96

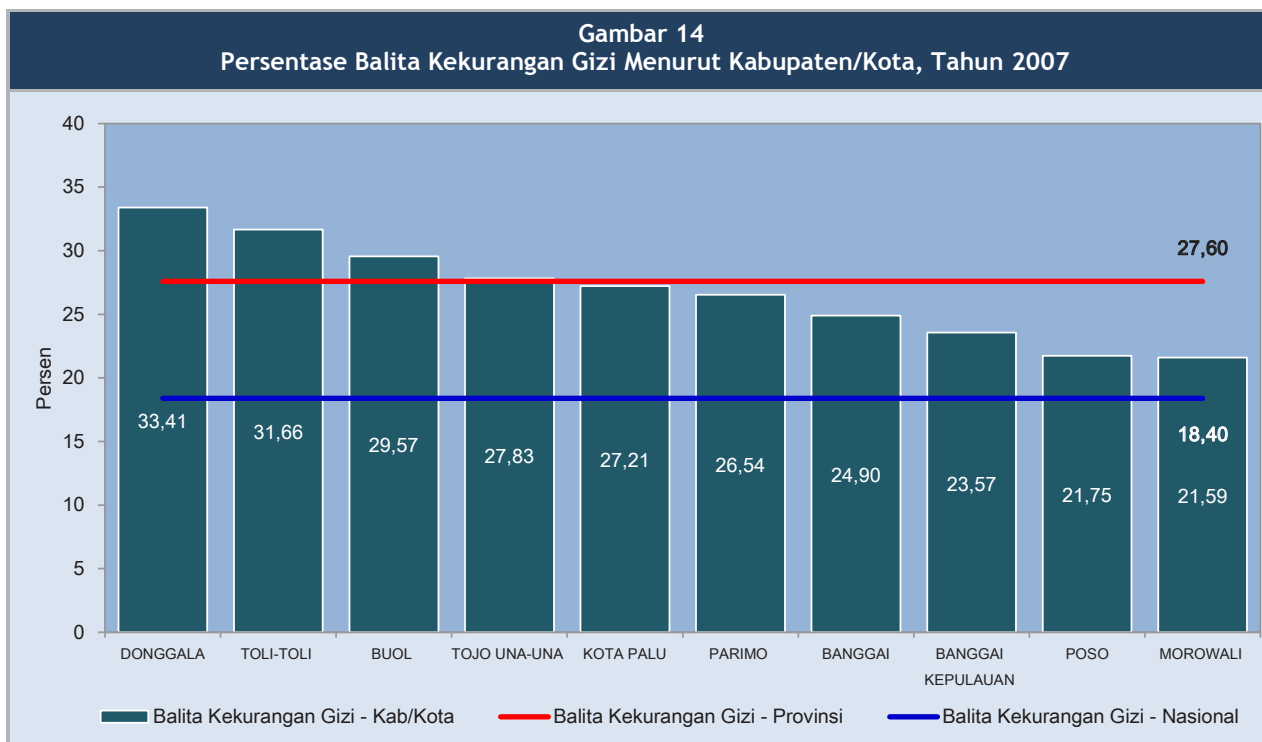
Keterangan: Daerah Pemekaran, Data Belum Tersedia.

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011 (Berdasarkan Hasil Sakernas Agustus 2010)

## BIDANG KESEHATAN

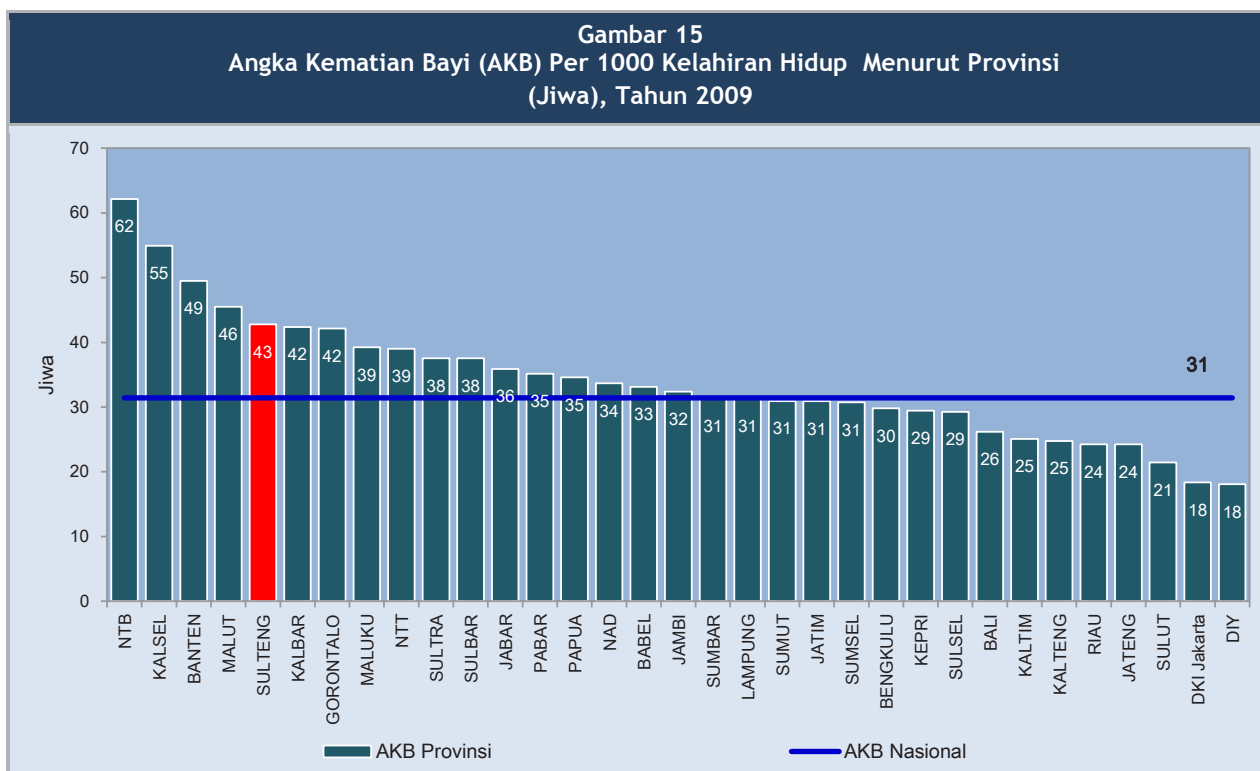


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2010

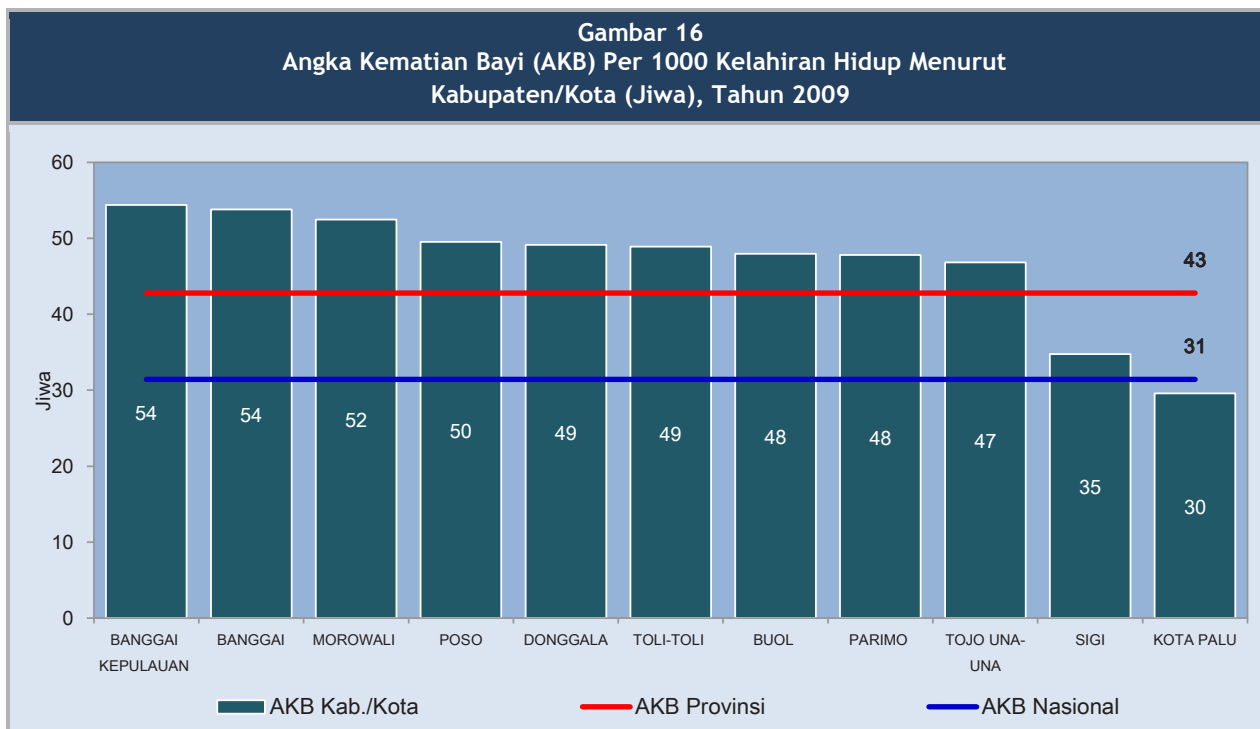


Sumber: Riset Kesehatan Dasar, Kementerian Kesehatan 2007

## BIDANG KESEHATAN



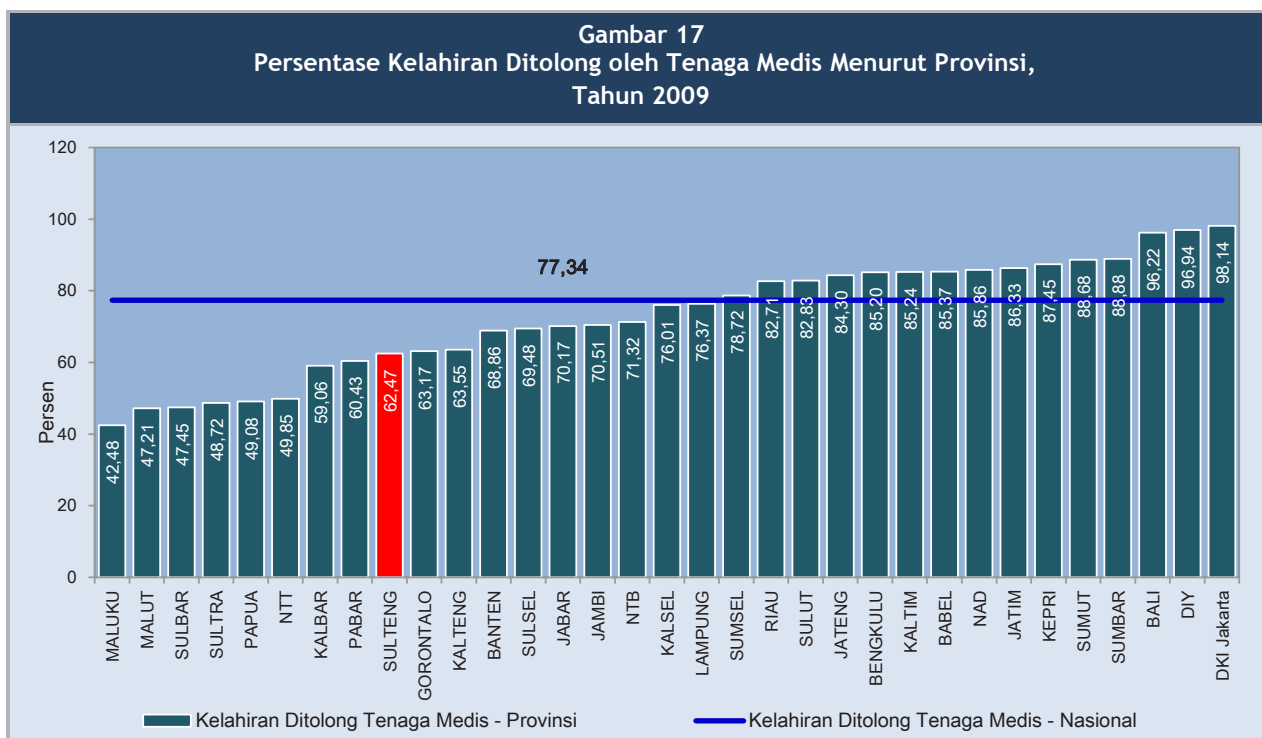
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



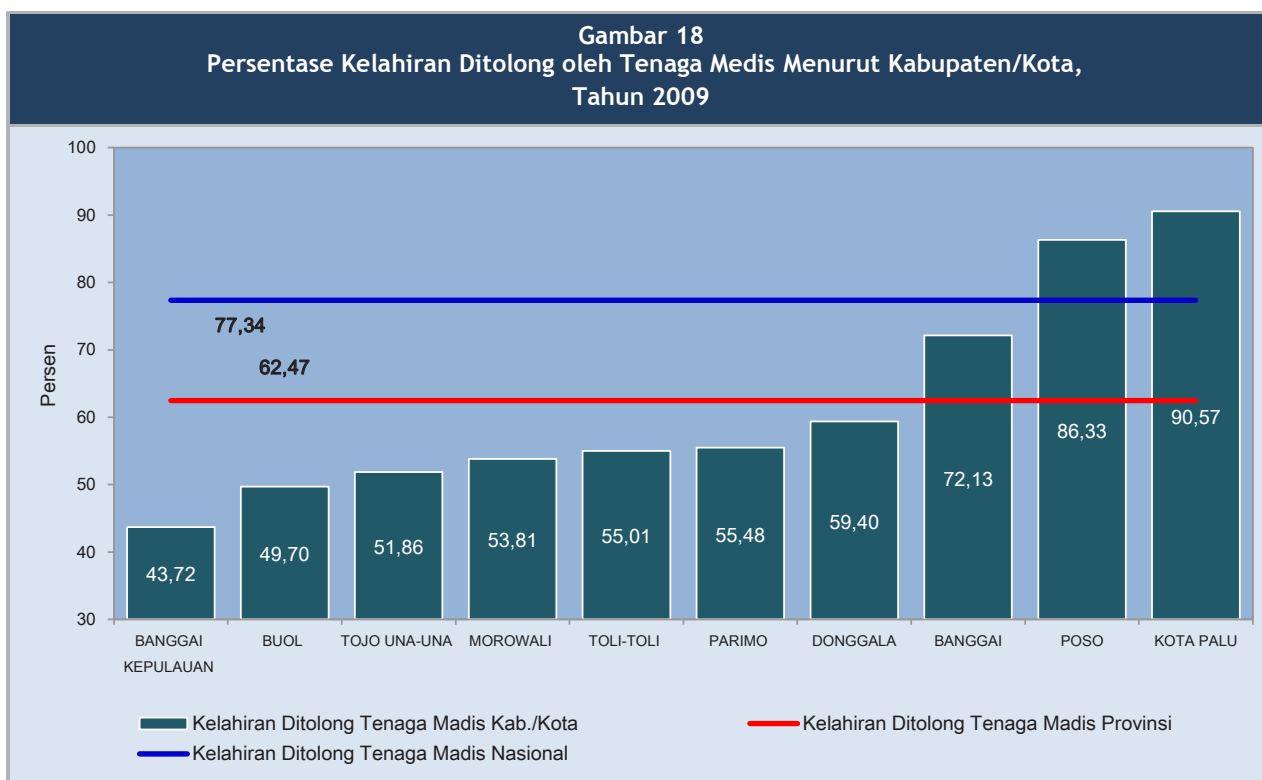
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



## BIDANG KESEHATAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



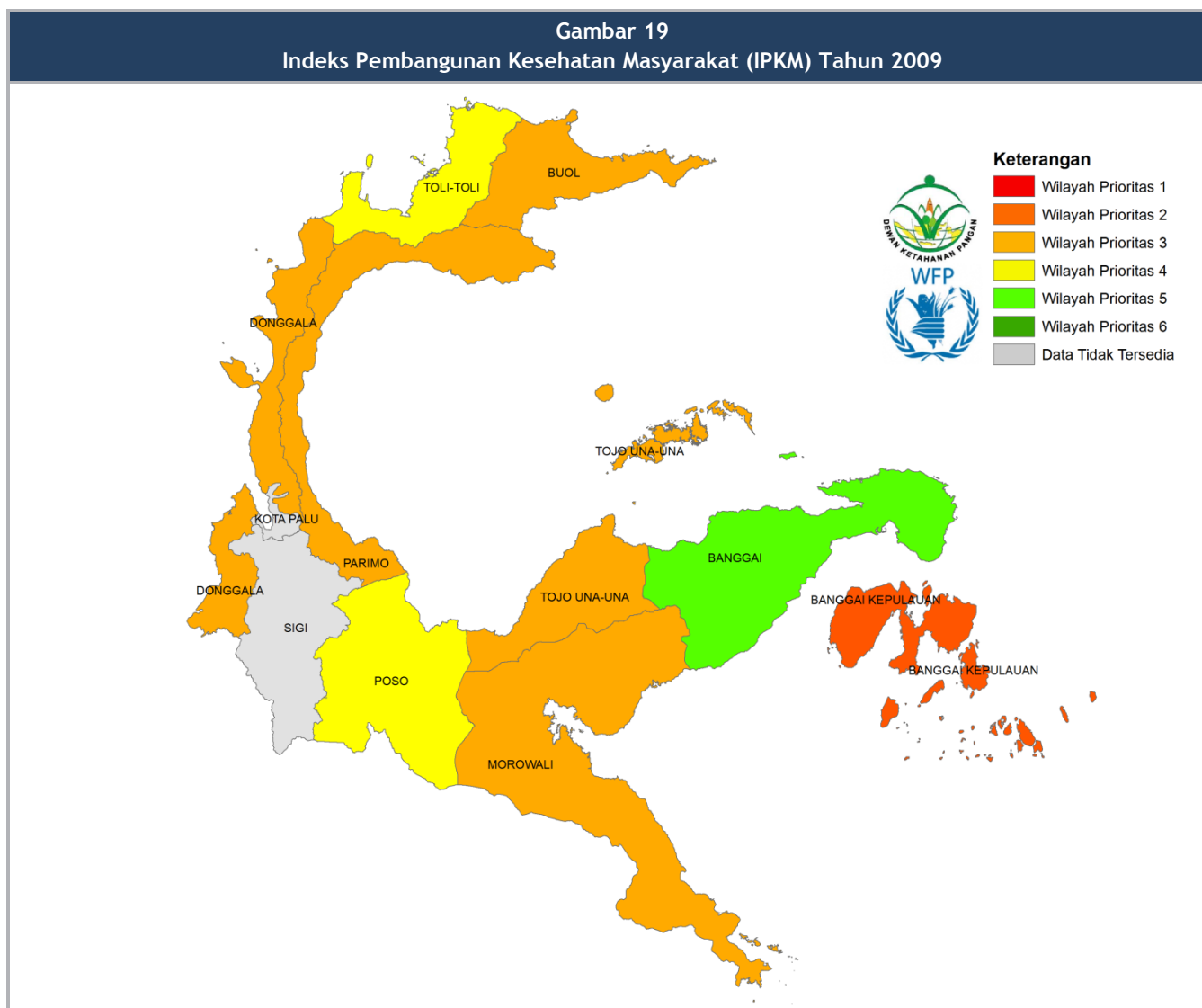
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

Tabel 6.  
Indikator Kesehatan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Penduduk dengan keluhan kesehatan	Angka Morbiditas	Rata-rata Lama Sakit	Penduduk yg Melakukan Pengobatan Sendiri
	(%)	(%)	(%)	(%)
BANGGAI KEPULAUAN	33,22	24,67	5,94	89,18
BANGGAI	36,86	25,58	5,27	76,04
MOROWALI	44,36	27,66	4,98	70,91
POSO	39,68	29,14	5,22	72,24
DONGGALA	34,71	22,72	5,13	76,78
TOLI-TOLI	47,53	34,81	5,71	85,94
BUOL	24,42	19,95	4,20	73,09
PARIMO	45,43	33,95	6,05	79,82
TOJO UNA-UNA	37,31	24,50	6,02	71,24
KOTA PALU	29,38	17,65	6,51	74,49
SULAWESI TENGAH	37,61	26,03	5,58	77,29
INDONESIA	33,68	18,63	5,51	68,41

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

# INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT



Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

## INDEKS PEMBANGUNAN KESEHATAN MASYARAKAT

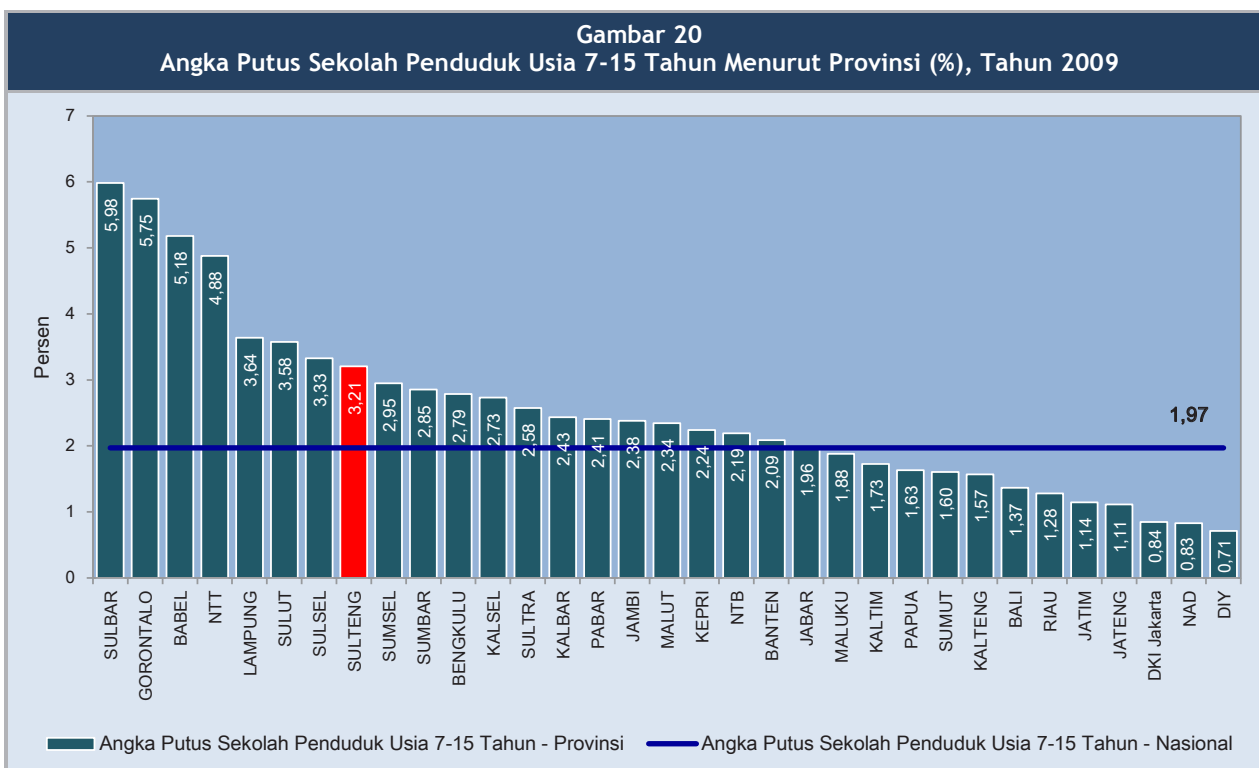
Tabel 7.  
Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM)<sup>2</sup> Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Kabupaten/Kota	Kategori Wilayah	IPKM		Keterangan
		Rangking	Nilai	
BANGGAI KEPULAUAN	KaC	330	0,44	Kabupaten Bermasalah Miskin
BANGGAI	KaD	265	0,48	Kabupaten Bermasalah Non Miskin
MOROWALI	KaE	239	0,49	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
POSO	KaE	142	0,56	Kabupaten Tidak Bermasalah Miskin
DONGGALA	KaC	337	0,44	Kabupaten Bermasalah Miskin
TOLI-TOLI	KaC	387	0,40	Kabupaten Bermasalah Miskin
BUOL	KaA	392	0,39	Kabupaten Bermasalah Berat Miskin
PARIGI MOUTONG	KaC	320	0,45	Kabupaten Bermasalah Miskin
TOJO UNA-UNA	KaC	295	0,46	Kabupaten Bermasalah Miskin
PALU	KoA	193	0,52	Kota Bermasalah Berat Miskin

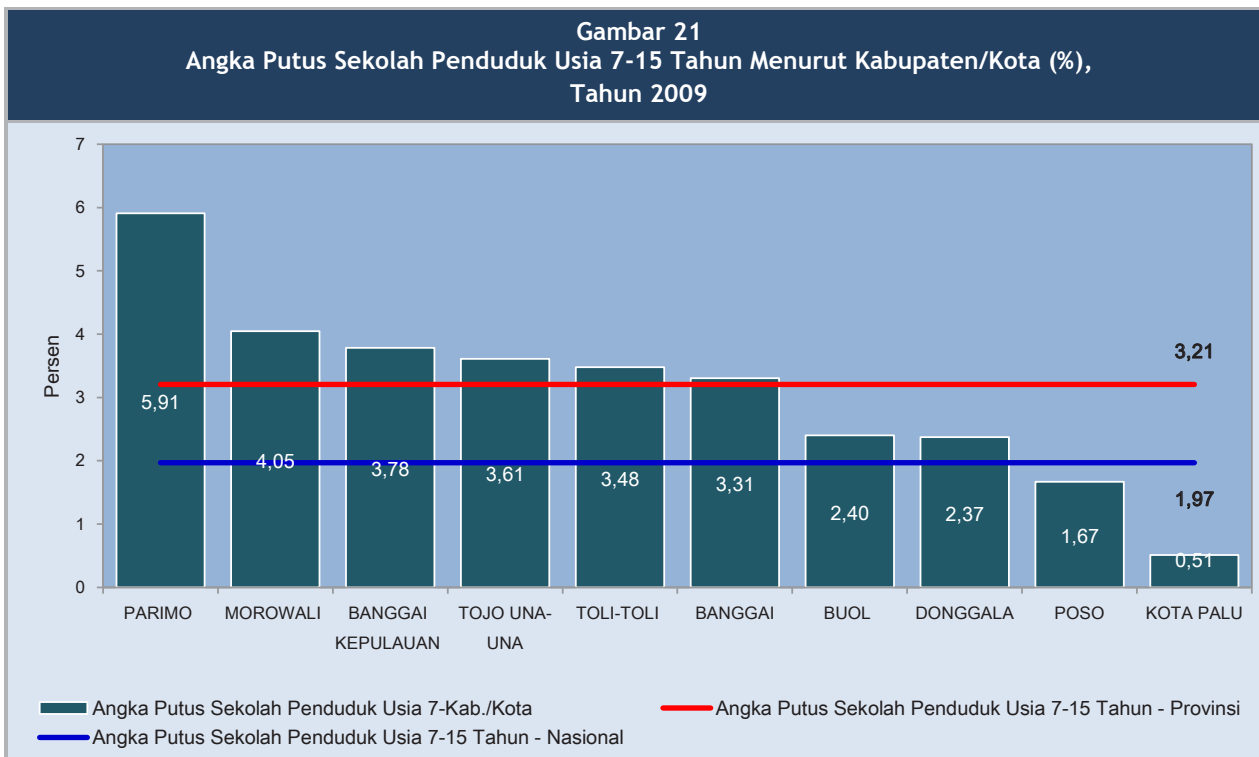
Sumber: Kementerian Kesehatan, 2010

<sup>2</sup> IPKM (Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat) adalah indikator komposit yang dirumuskan dari 24 indikator kesehatan dan dirumuskan dari data kesehatan berbasis komunitas yaitu: Riskesdas (Riset Kesehatan Dasar); Susenas (Survei Ekonomi Nasional); dan Survei Podes (Potensi Desa). IPKM digunakan untuk mengukur kemajuan pembangunan pada bidang kesehatan dan mendukung efektivitas intervensi pada bidang kesehatan.

## BIDANG PENDIDIKAN



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

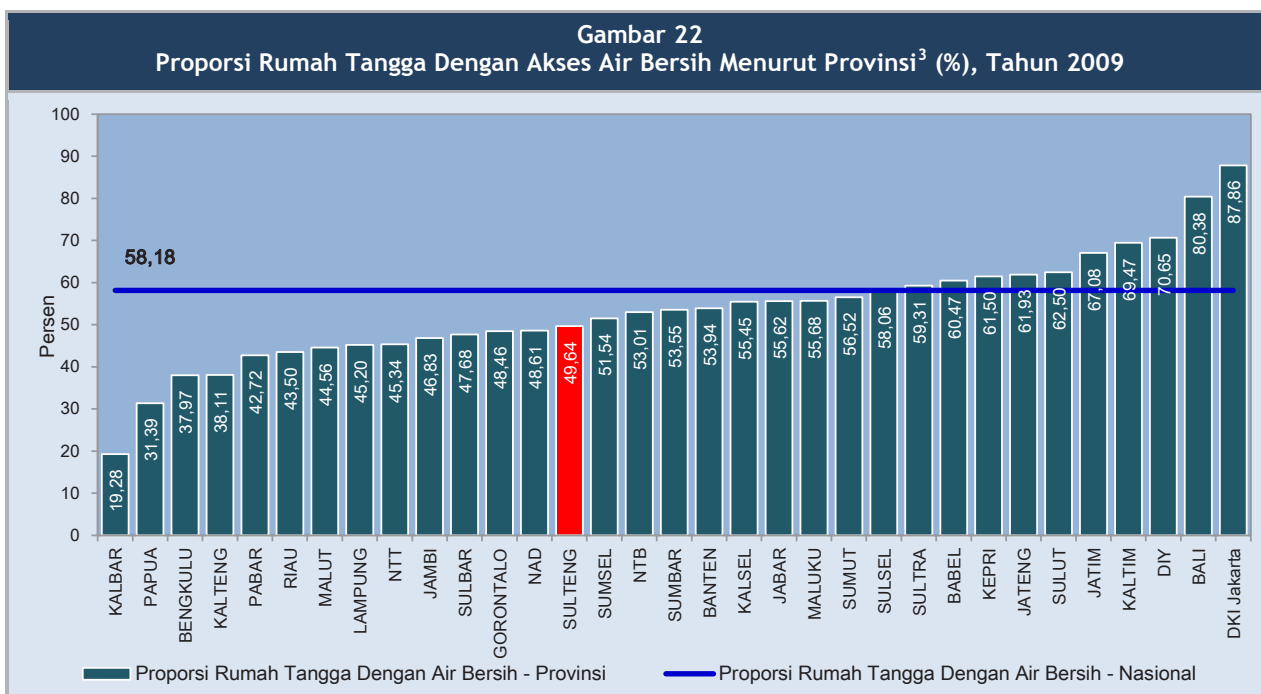
## BIDANG PENDIDIKAN

Tabel 8.  
Indikator Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

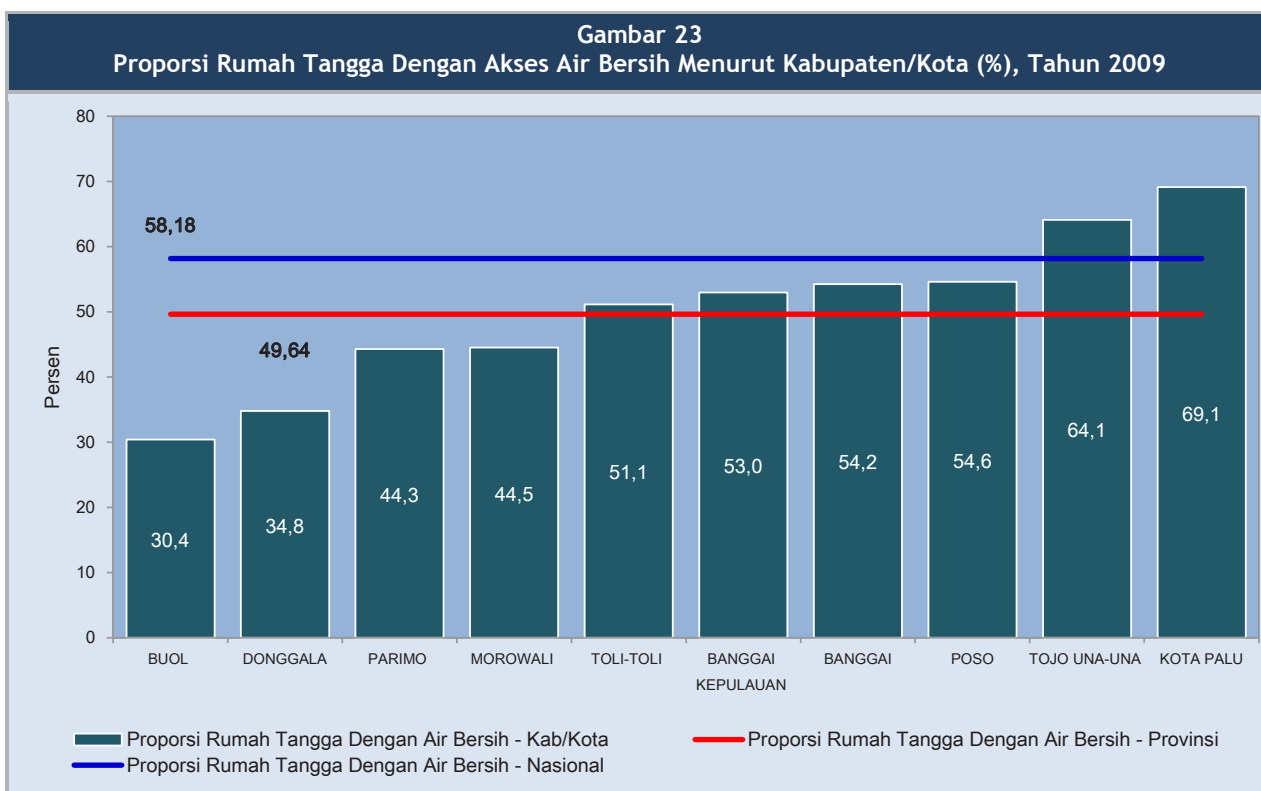
Daerah	Angka Partisipasi Pendidikan					
	Sekolah Dasar (SD/MI)		Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs)		Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/SMK)	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
BANGGAI KEPULAUAN	120,51	96,38	64,34	52,39	52,90	33,09
BANGGAI	121,18	96,33	66,74	59,84	70,55	43,21
MOROWALI	112,80	96,58	87,16	57,82	39,32	33,02
POSO	115,20	95,62	91,89	69,06	63,40	40,70
DONGGALA	119,21	95,15	70,63	62,99	50,03	31,13
TOLI-TOLI	113,03	89,96	68,17	53,31	48,84	32,78
BUOL	110,10	93,10	83,23	66,53	63,84	43,45
PARIMO	112,22	92,33	72,65	57,30	44,25	33,76
TOJO UNA-UNA	108,52	89,67	84,71	52,29	79,61	41,65
KOTA PALU	100,27	84,93	95,33	65,24	83,12	58,27
SULAWESI TENGAH	113,79	92,98	76,69	60,22	59,35	39,52
INDONESIA	110,42	94,37	81,25	67,43	62,55	45,11

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

## AKSES TERHADAP AIR BERSIH



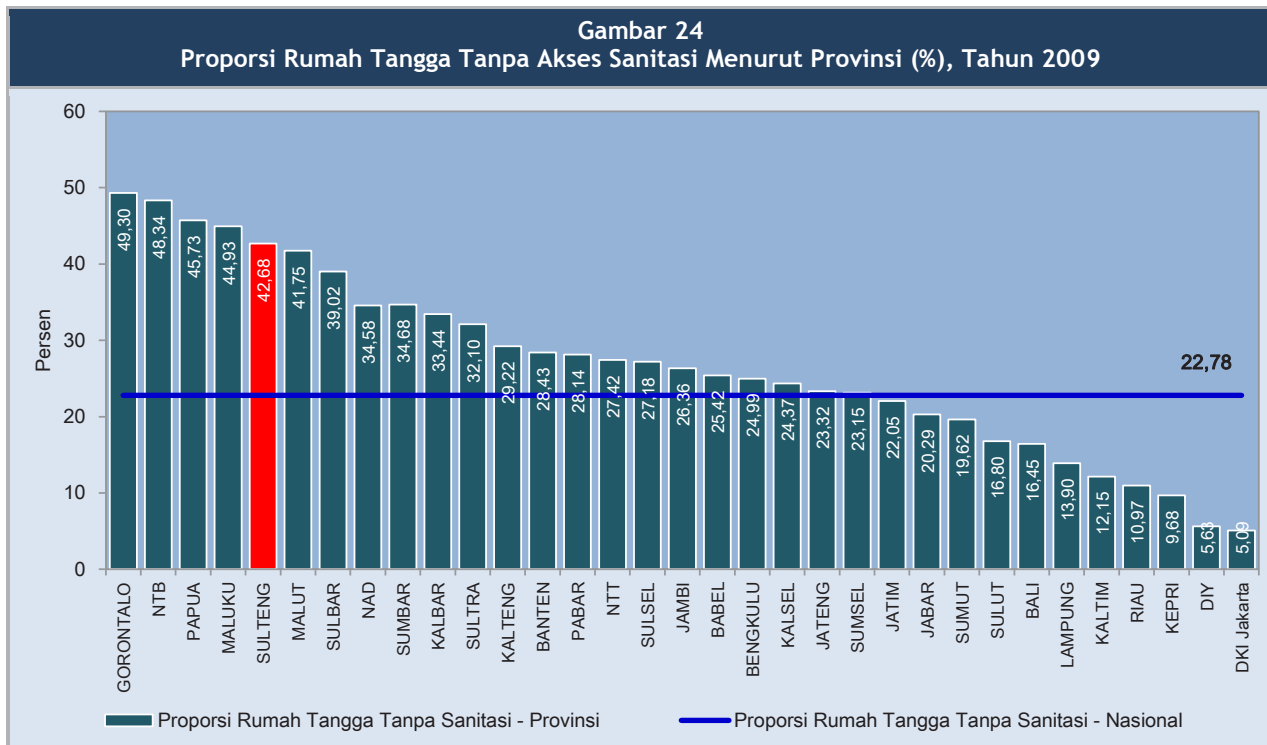
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



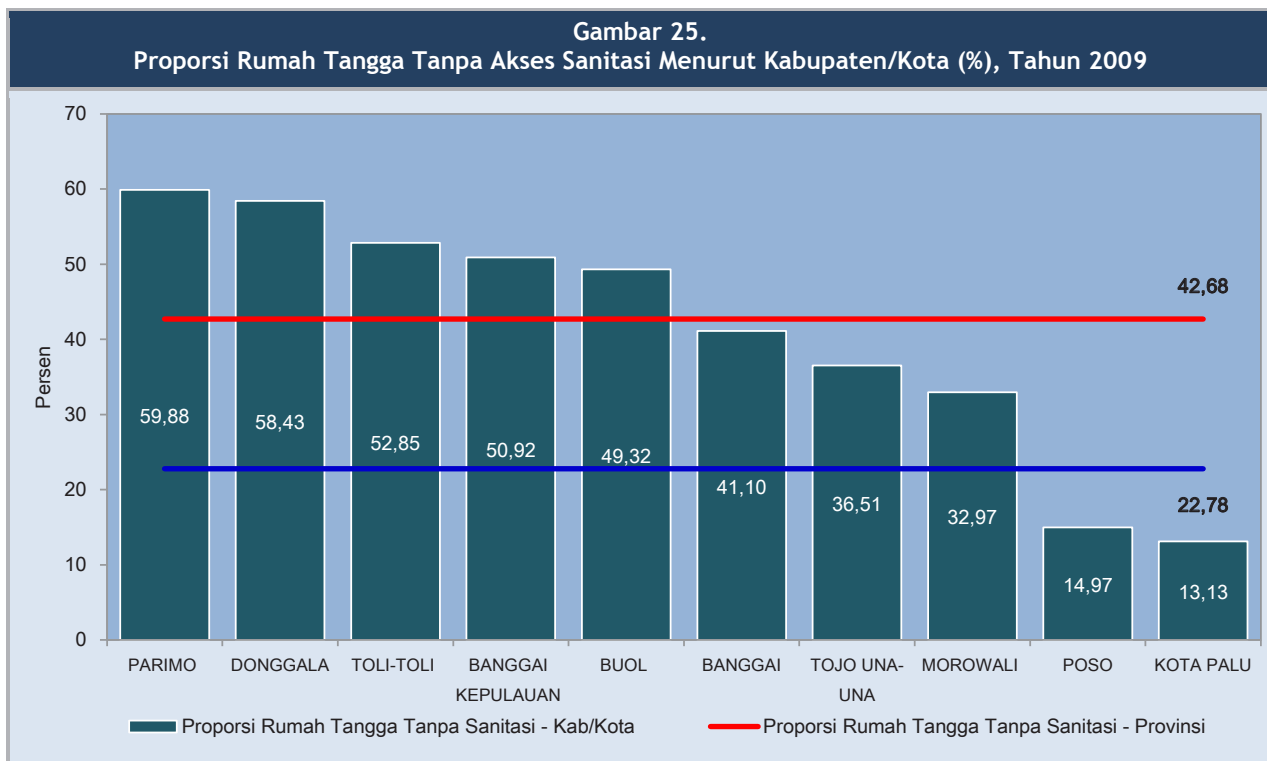
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

<sup>3</sup> Akses terhadap air bersih dengan kontrol jarak ke tempat penampungan kotoran/tinja terdekat

# AKSES TERHADAP SANITASI



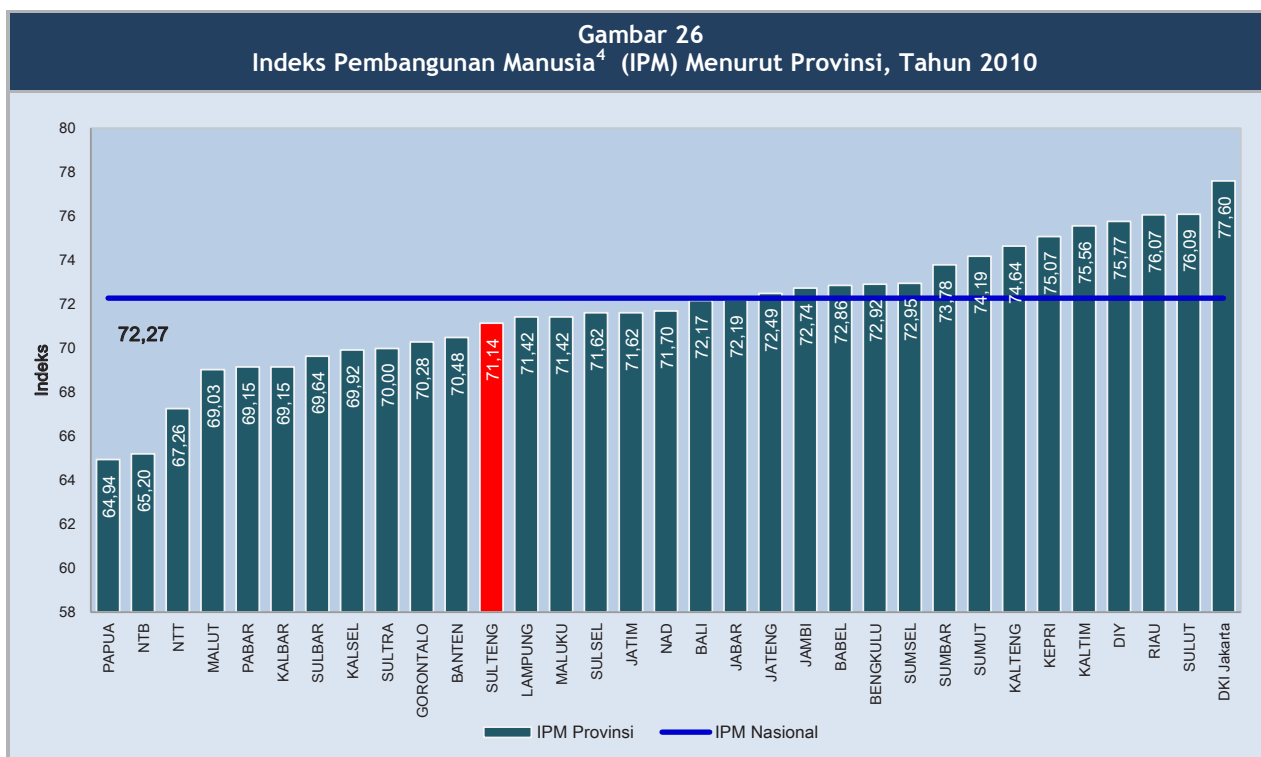
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



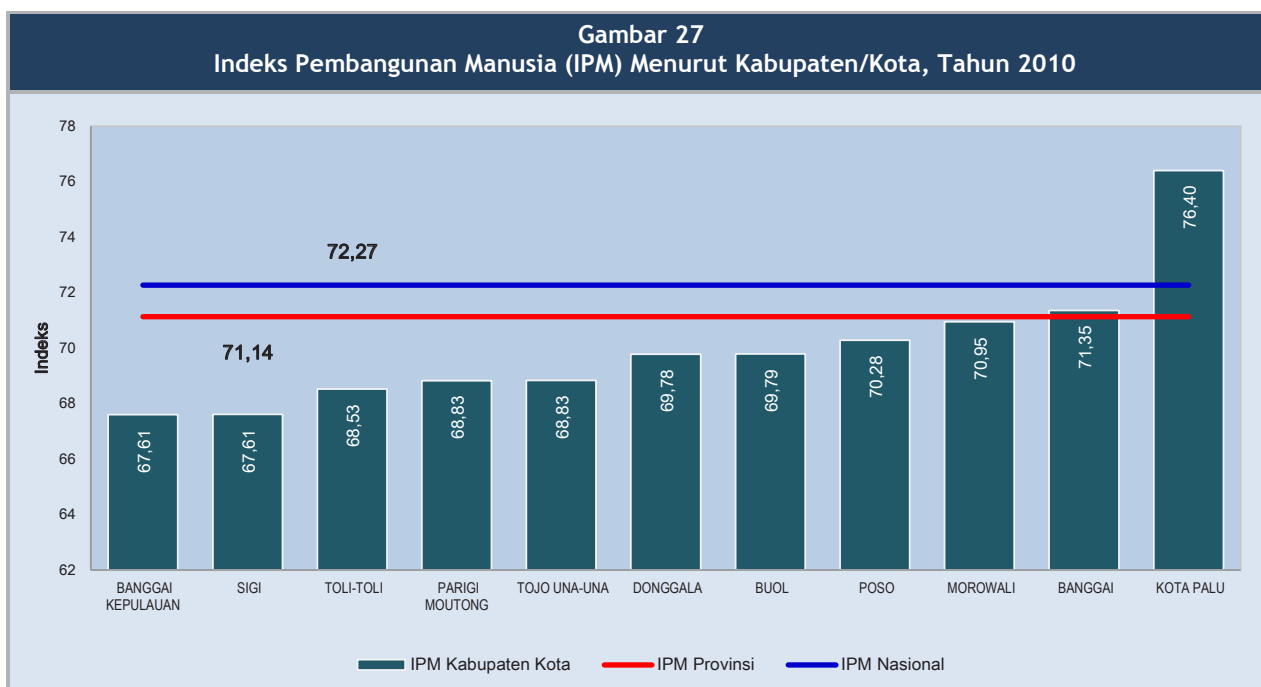
Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010



# INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011



Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

<sup>4</sup> Indeks Pembangunan Manusia (IPM) / Human Development Index (HDI) adalah pengukuran kesejahteraan dengan membandingkan antara harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. Ukuran kesejahteraan tersebut diperkenalkan dan diterbitkan oleh PBB dalam Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report) sejak tahun 1990.

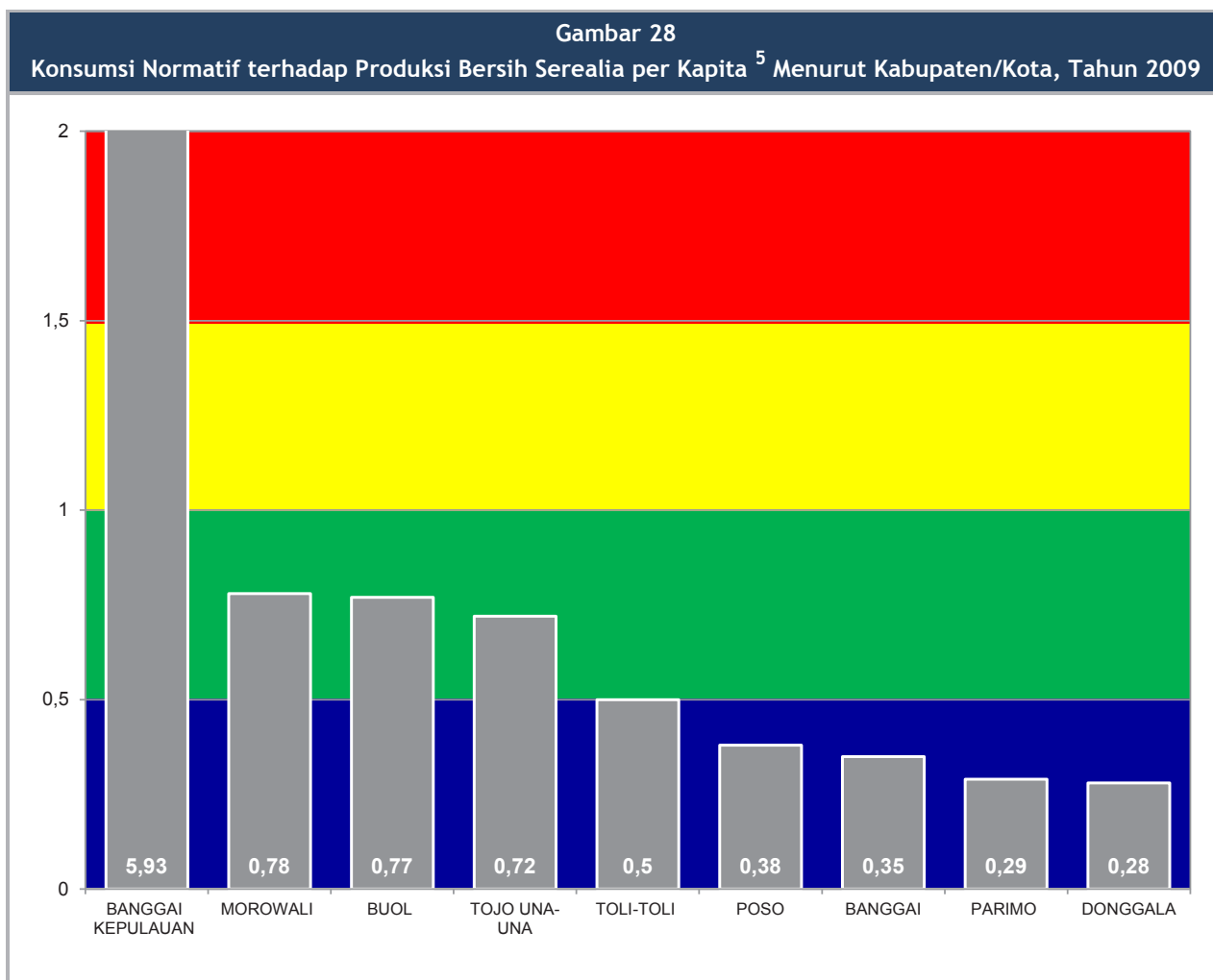
## KOMPONEN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Tabel 9.  
Komponen Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Menurut Kabupaten/Kota,  
Tahun 2009 dan 2010

Provinsi	Angka Harapan Hidup		Angka Melek Huruf		Rata-rata Lama Sekolah		Pengeluaran Per Kapita		IPM	
	(Tahun)		(Persen)		(Tahun)		(Ribu Rp PPP)		2009	2010
	2009	2010	2009	2010	2009	2010	2009	2010		
BANGGAI KEPULAUAN	63,59	63,85	94,93	94,93	7,30	7,57	610,09	610,85	67,21	67,61
BANGGAI	68,31	68,51	95,94	95,94	7,75	7,95	616,43	619,31	70,87	71,35
MOROWALI	65,38	65,55	97,44	97,44	7,85	8,02	626,84	630,40	70,46	70,95
POSO	64,74	64,96	97,90	97,90	8,44	8,76	613,66	617,50	69,62	70,28
DONGGALA	64,90	65,27	94,14	94,66	7,52	7,52	629,24	630,10	69,40	69,78
TOLI-TOLI	64,04	64,26	95,16	95,34	7,40	7,42	617,88	620,07	68,18	68,53
BUOL	65,16	65,38	98,22	98,64	8,18	8,25	609,98	610,82	69,45	69,79
PARIGI MOUTONG	64,84	65,16	93,68	93,93	7,10	7,12	621,79	624,45	68,37	68,83
TOJO UNA-UNA	63,73	63,87	97,46	97,50	7,89	7,90	611,32	615,94	68,38	68,83
SIGI	65,12	65,36	96,38	96,40	7,95	7,99	588,85	591,65	67,22	67,61
KOTA PALU	69,71	69,99	99,25	99,25	10,95	10,97	632,45	635,57	75,99	76,40
<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>66,35</b>	<b>66,60</b>	<b>95,78</b>	<b>96,08</b>	<b>7,89</b>	<b>8,00</b>	<b>627,40</b>	<b>629,30</b>	<b>70,70</b>	<b>71,14</b>
<b>INDONESIA</b>	<b>69,21</b>	<b>69,43</b>	<b>92,58</b>	<b>92,91</b>	<b>7,72</b>	<b>7,92</b>	<b>631,46</b>	<b>633,64</b>	<b>71,76</b>	<b>72,27</b>

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2011

## KETAHANAN PANGAN



Sumber: Badan Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten, 2009 dan Sulawesi Tengah Dalam Angka (BPS), 2010.

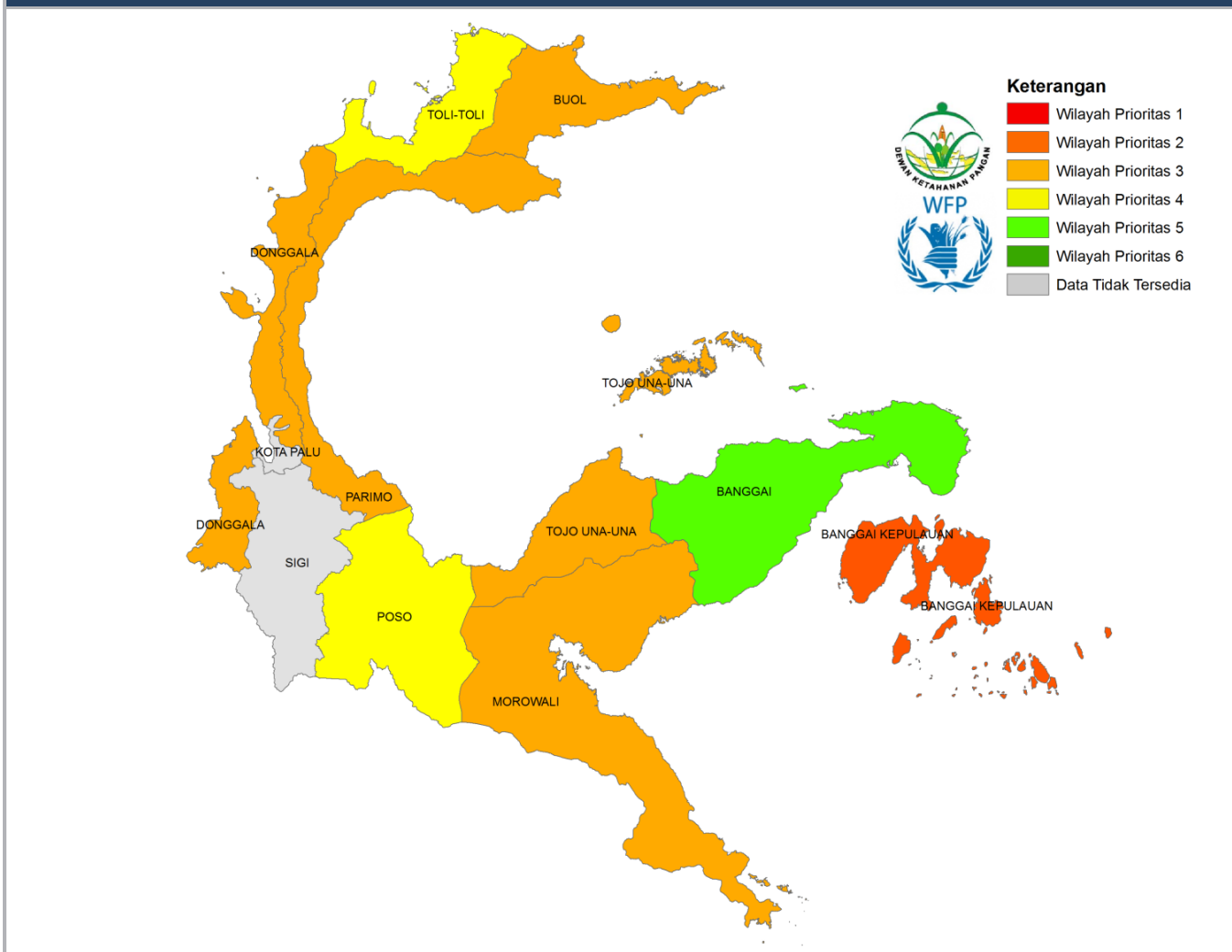
### Keterangan:

- >1,5 Defisit Tinggi
- 1 – 1,5 Defisit Sedang
- 0,5 – 1 Surplus Rendah
- 0 – 0,5 Surplus Tinggi
- 0 Data Tidak Tersedia

<sup>5</sup> Merupakan salah satu ukuran ketahanan pangan di tingkat Kabupaten dan Kota dan termasuk dalam Peta Kerawanan Pangan Indonesia (Food Insecurity Atlas-FIA) diperkenalkan oleh DKP, Badan Ketahanan Pangan provinsi dan kabupaten bekerja sama dengan World Food Programme (WFP) pada tahun 2005.

# KETAHANAN PANGAN

Gambar 29  
Peta Kerentanan Terhadap Kerawanan Pangan<sup>6</sup> Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009



Sumber: Badan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009

<sup>6</sup> Pada tahun 2009, cakupan diperluas dari 30 provinsi di 265 kabupaten menjadi 32 provinsi dan 346 kabupaten serta merupakan konsolidasi berbagai aspek yang terkait dengan ketahanan pangan, seperti ketersediaan pangan, akses dan distribusi pangan serta gizi dan kesehatan yang dipublikasikan dengan nama "Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (Food Security and Vulnerability Atlas – FSVA)"

# KETAHANAN PANGAN

Tabel 10.  
Komponen Indeks Komposit Ketahanan Pangan, Menurut Kabupaten/Kota, Tahun 2009

Daerah	Ketersediaan Pangan			Akses Pangan			Akses terhadap Kesehatan dan Gizi				Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index)
	Produksi Bersih Serealia-Kab./Kota (Kg/kapita/hari)	Rasio Konsumsi Normatif-Kab./Kota	Tingkat Kemiskinan (%)	Rasio Non Elektrifikasi	Desa tanpa Akses ke Jalan (%)	Angka Buta Huruf Perempuan (%)	Angka Harapan Hidup (Tahun)	Prevalensi Balita Kekurangan Gizi (%)	Penduduk tanpa akses pada fasilitas sarana kesehatan (%)	Penduduk tanpa akses pada air bersih* (%)	
	2009	2009	2009	2008	2008	2009	2009	2007	2008	2009	
BANGGAI KEPULAUAN	51	5.93	21.99	51.72	6.74	7.11	63.59	28.9	13.47	47.04	337.4
BANGGAI	850	0.35	14.60	44.18	2.33	4.45	68.31	31.8	8.95	45.78	271.9
MOROWALI	383	0.78	22.53	46.56	10.00	5.43	65.38	28.2	20.83	55.50	433.7
POSO	781	0.38	23.29	32.22	0.64	2.42	64.74	27.4	12.18	45.42	285.1
DONGGALA	1,070	0.28	18.91	34.55	0.65	6.94	64.90	37.6	19.28	65.22	488.5
TOLI-TOLI	604	0.5	17.83	39.12	1.20	7.33	64.04	35.5	2.41	48.87	176.6
BUOL	391	0.77	20.68	50.51	0.00	3.19	65.16	36.2	6.48	69.61	269.4
PARIMO	1,035	0.29	19.72	37.27	0.00	8.77	64.84	30.0	13.41	55.73	332.3
TOJO UNA-UNA	414	0.72	26.23	43.68	15.70	4.85	63.73	32.6	14.88	35.91	372.9
SIGI***							65.12				52.2
KOTA PALU**			9.19	6.12	0.00	2.03	69.71	31.0	0.00	30.90	91.3

Sumber: Badan Pusat Statistik 2011, Dewan Ketahanan Pangan, Departemen Pertanian RI dan WFP, 2009.

Keterangan:

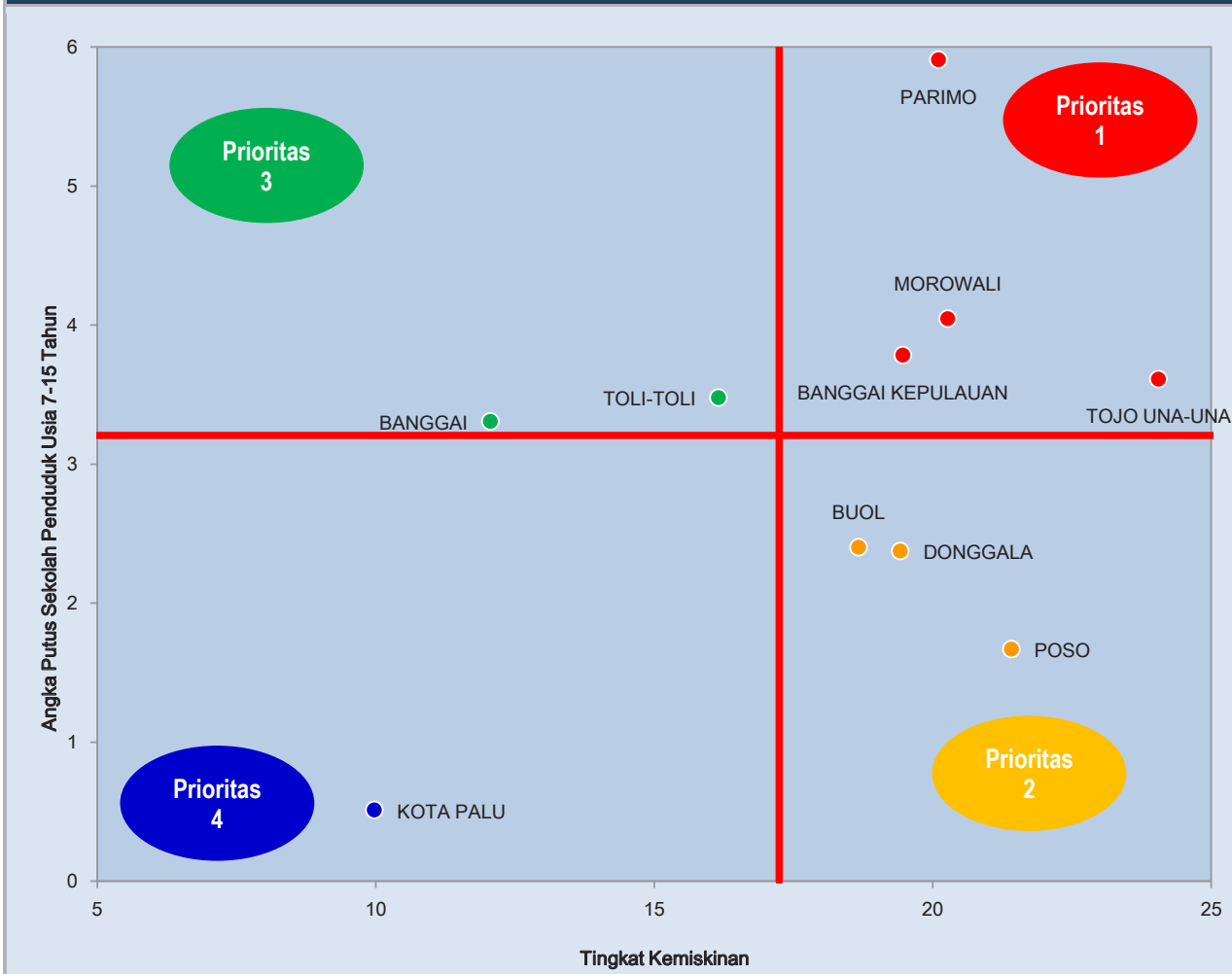
\*Air Bersih dihitung dengan menggunakan kontrol jarak dari tempat pembuangan kotoran/limbah

\*\* Terdapat beberapa komponen dari Indeks Komposit Ketahanan Pangan (CFSI - Composite Food Security Index) yang tidak dihitung karena belum terdata secara lengkap.

\*\*\* Data tidak tersedia (wilayah pemekaran).

# PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN

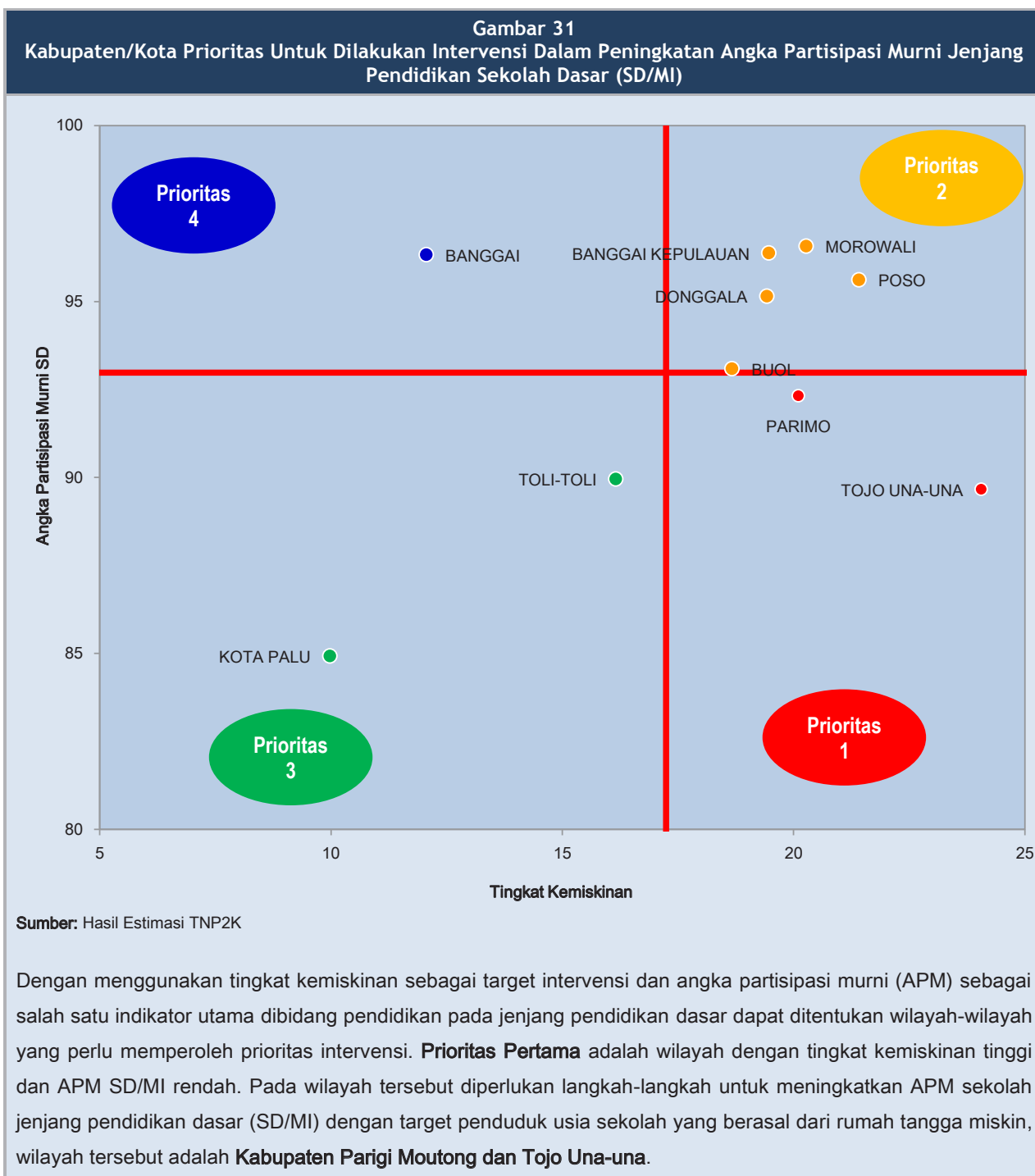
Gambar 30  
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Penurunan Angka Putus Sekolah Penduduk Usia 7-15 Tahun



Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

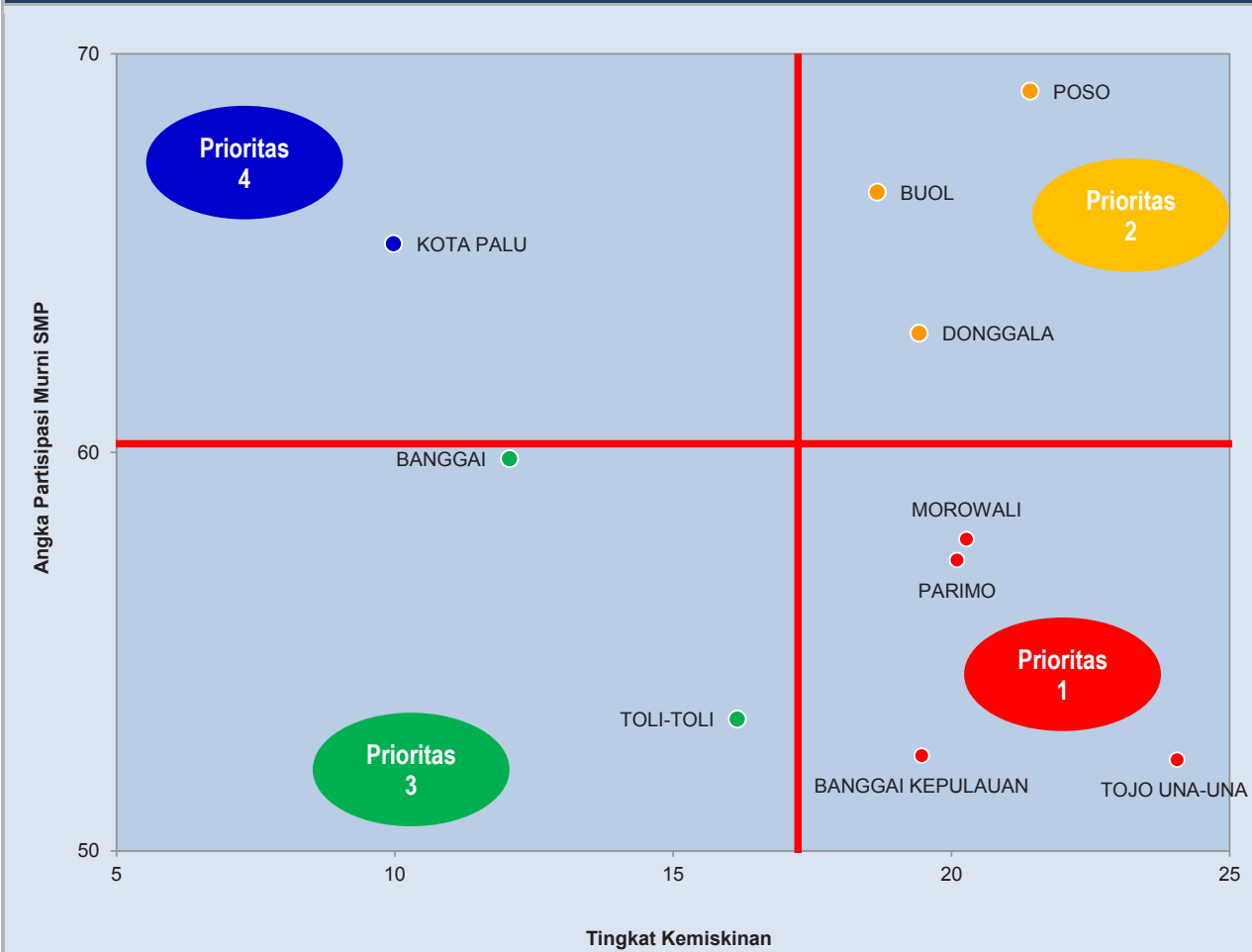
Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka putus sekolah penduduk usia 7-15 tahun sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan angka putus sekolah tinggi. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk menurunkan angka putus sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin. **Kabupaten Morowali, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-una** merupakan wilayah Prioritas Pertama.

## PRIORITAS BIDANG PENDIDIKAN



# PRIORITAS BIDANG KESEHATAN

**Gambar 32**  
Kabupaten/Kota Prioritas Untuk Dilakukan Intervensi Dalam Peningkatan Angka Partisipasi Murni Jenjang Pendidikan Menengah Pertama

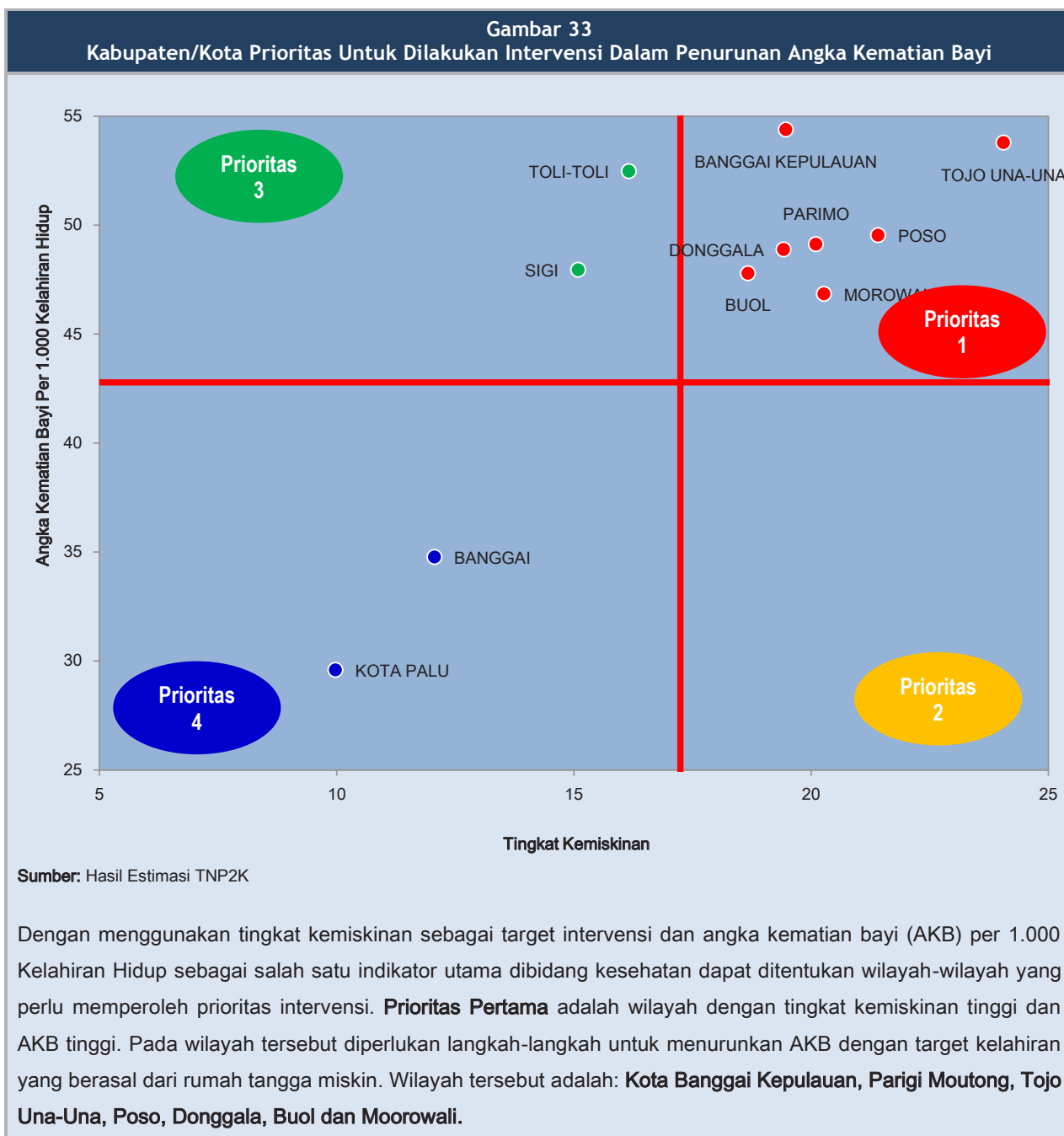


Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

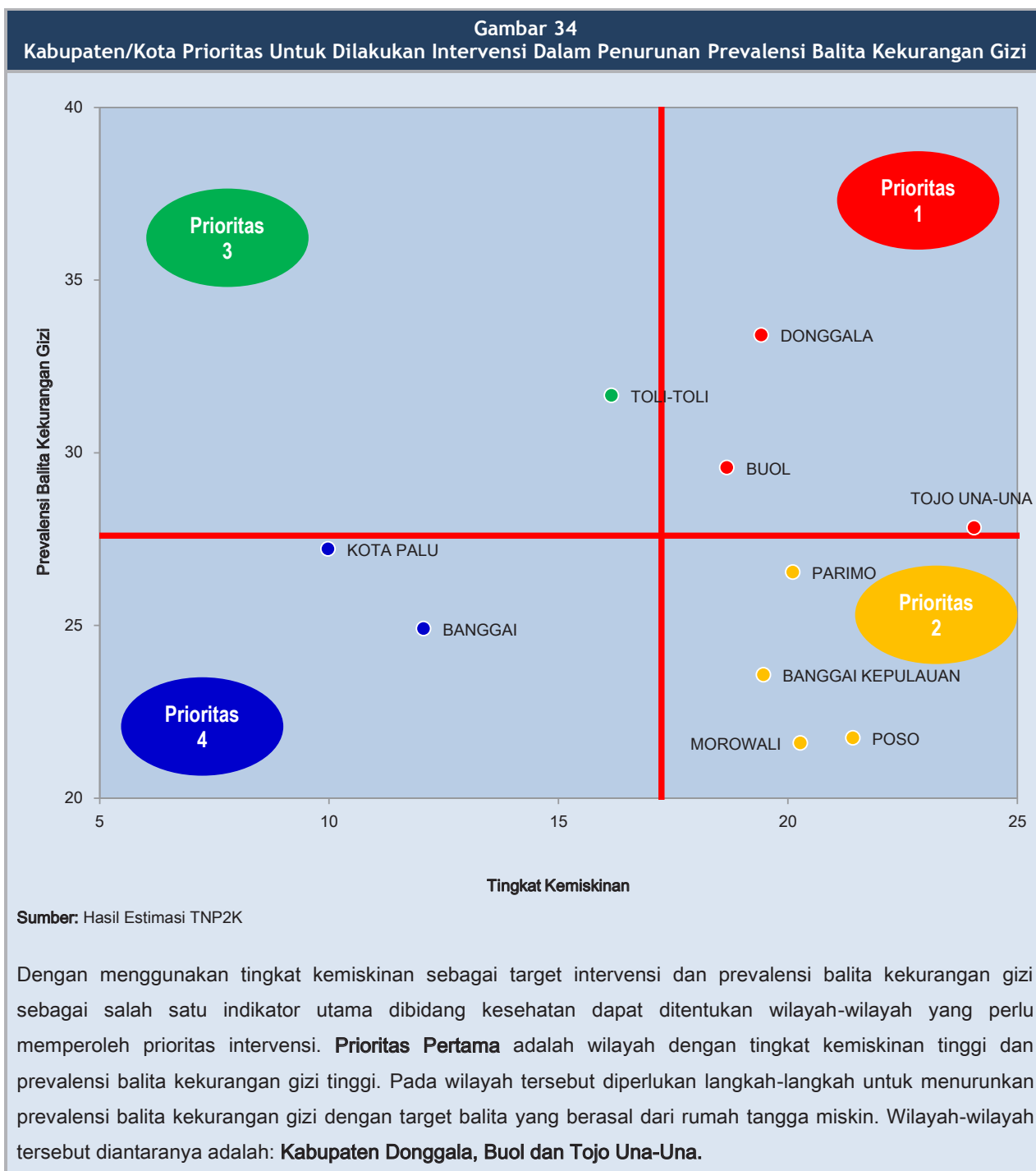
Dengan menggunakan tingkat kemiskinan sebagai target intervensi dan angka partisipasi murni (APM) sebagai salah satu indikator utama dibidang pendidikan pada jenjang pendidikan menengah pertama dapat ditentukan wilayah-wilayah yang perlu memperoleh prioritas intervensi. **Prioritas Pertama** adalah wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan APM SMP/MTs rendah. Pada wilayah tersebut diperlukan langkah-langkah untuk meningkatkan APM sekolah jenjang pendidikan menengah pertama (SMP/MTs) dengan target penduduk usia sekolah yang berasal dari rumah tangga miskin, wilayah tersebut adalah **Kabupaten Morowali, Pargi Moutong, Banggai Kepulauan dan Tojo Una-Una.**



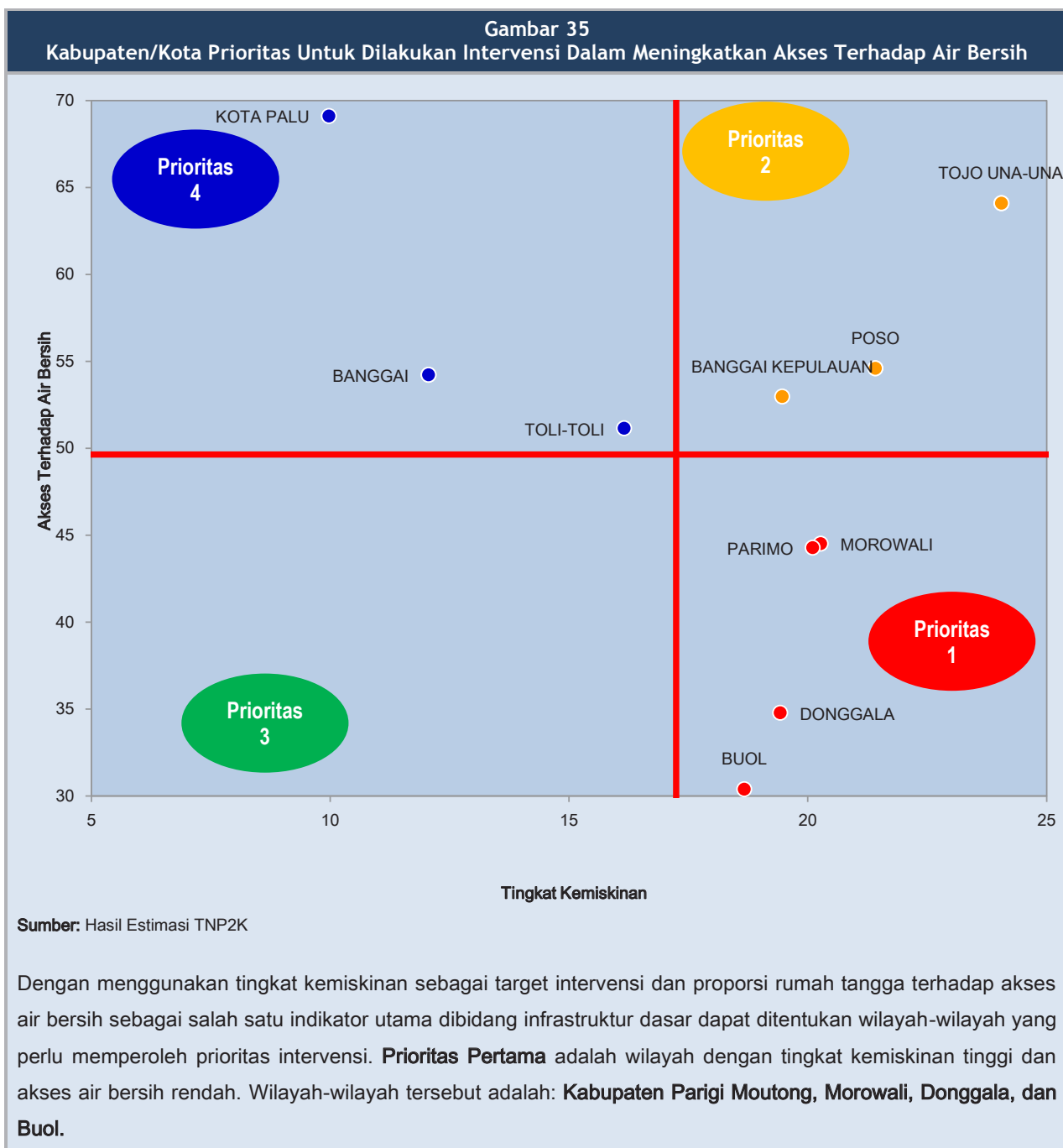
# PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



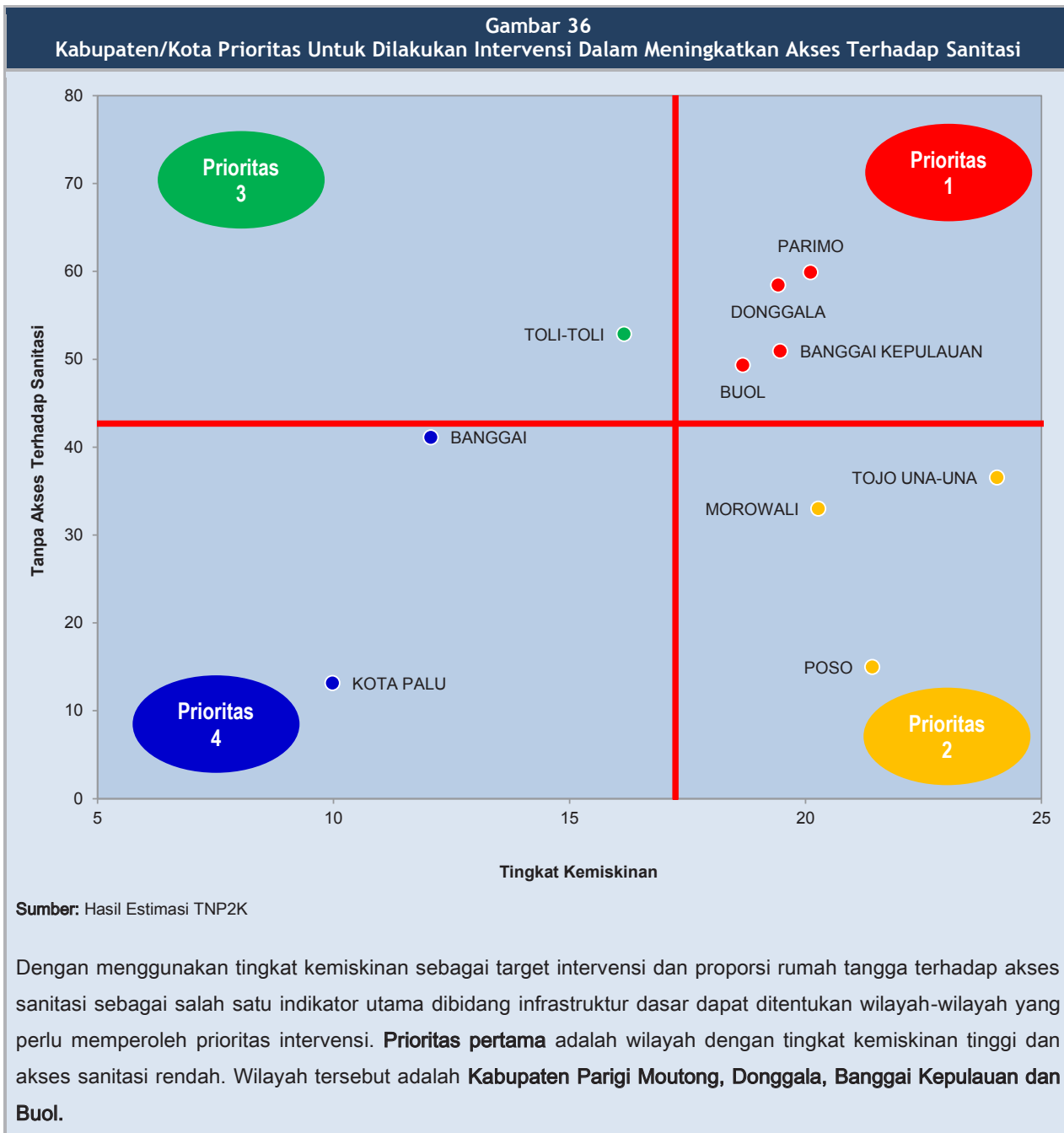
## PRIORITAS BIDANG KESEHATAN



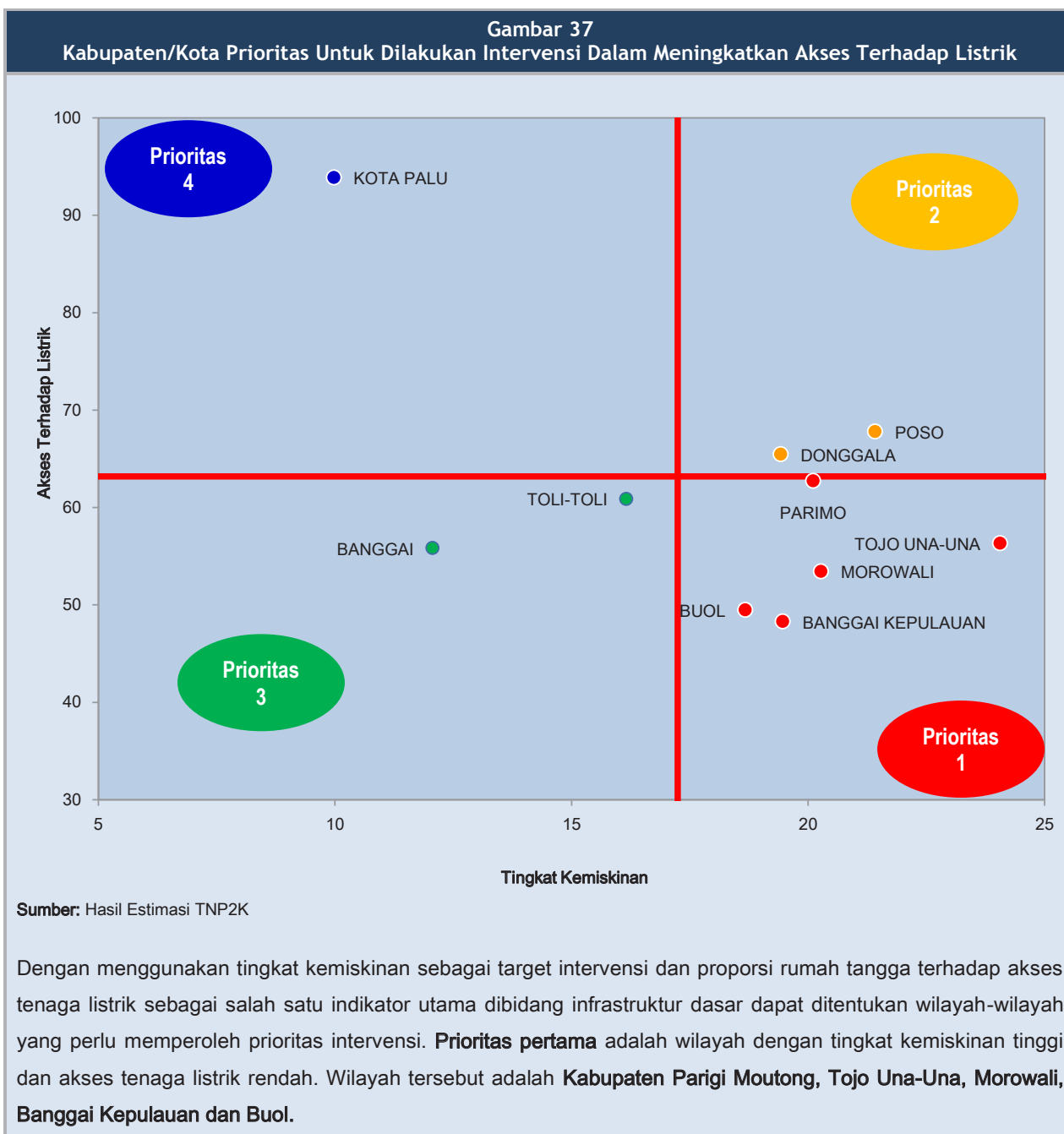
## PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



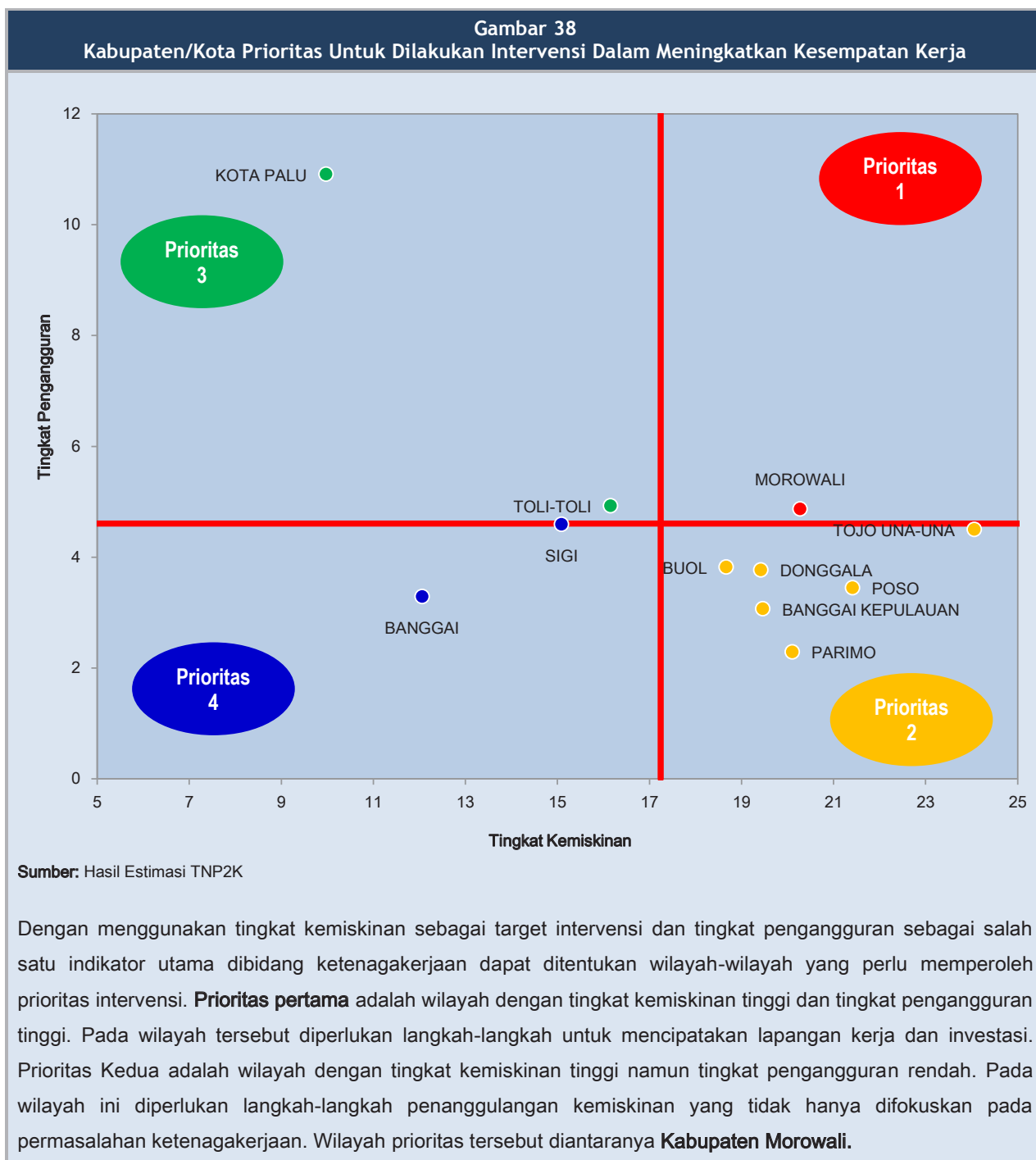
# PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



## PRIORITAS BIDANG INFRASTRUKTUR DASAR



## PRIORITAS BIDANG KETENAGAKERJAAN



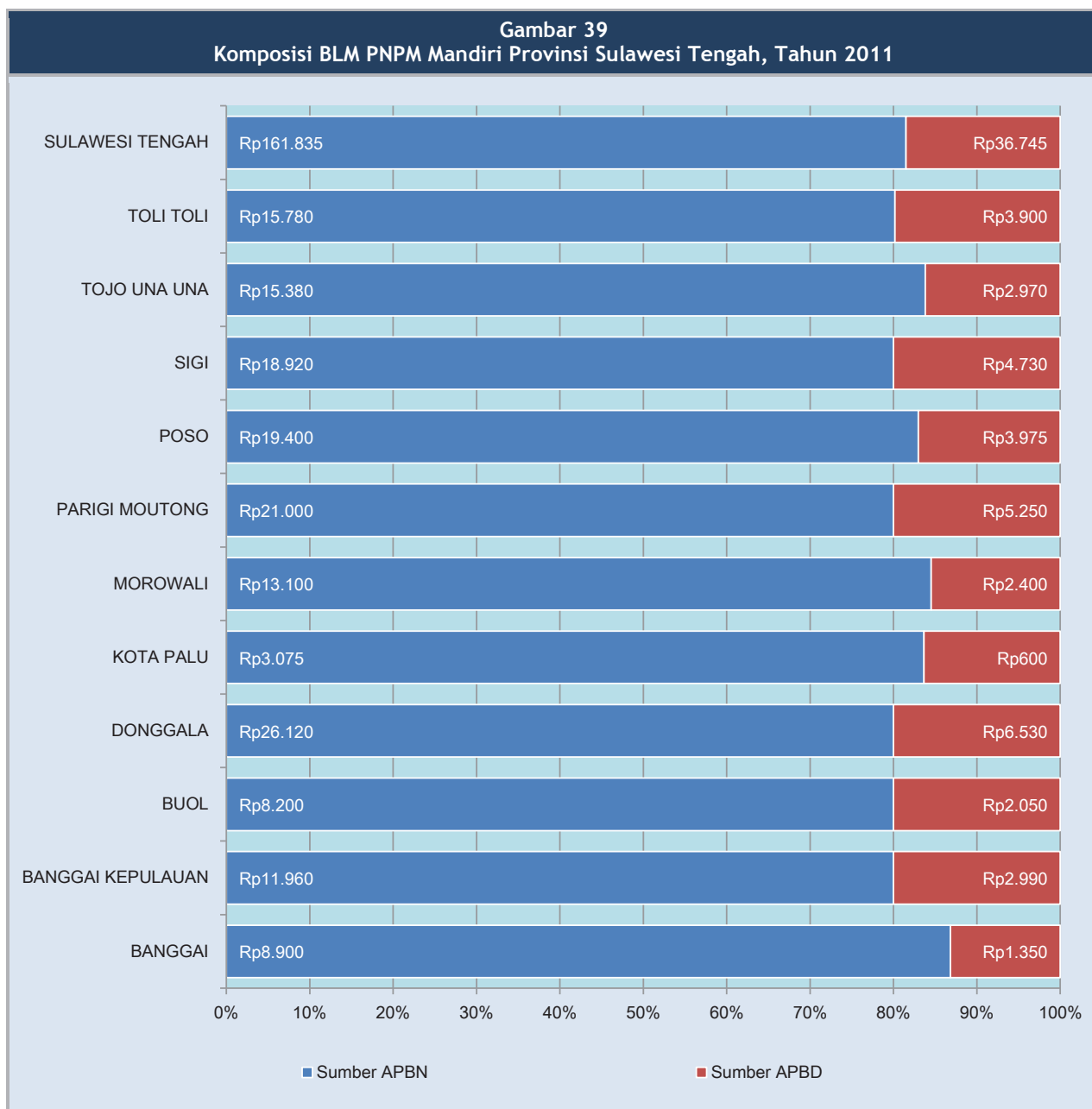
## BIDANG-BIDANG PRIORITAS KESEJAHTERAAN RAKYAT

Tabel 11  
Rekapitulasi Prioritas Intervensi Menurut Kabupaten Kota<sup>7</sup>

Kabupaten/Kota	Angka Putus Sekolah Usia 7-15 Th	Angka Partisipasi Murni SD/MI	Angka Partisipasi Murni SMP/MTs	AKB Per 1.000 Kelahiran Hidup	Prevalensi Balita Kurang Gizi	Akses Terhadap Air Bersih	Akses Terhadap Sanitasi	Akses Terhadap Listrik	Tingkat Pengangguran
PARIMO	1	1	1	1	2	1	1	1	2
MOROWALI	1	2	1	1	2	1	2	1	1
TOJO UNA-UNA	1	1	1	1	1	2	2	1	2
BANGGAI KEPULAUAN	1	2	1	1	2	2	1	1	2
BUOL	2	2	2	1	1	1	1	1	2
DONGGALA	2	2	2	1	1	1	1	2	2
POSO	2	2	2	1	2	2	2	2	2
TOLI-TOLI	3	3	3	3	3	4	3	3	3
SIGI	-	-	-	3	-	-	-	-	4
BANGGAI	3	4	3	4	4	4	4	3	4
KOTA PALU	4	3	4	4	4	4	4	4	3

Sumber: Hasil Estimasi TNP2K

<sup>7</sup> Kabupaten/Kota dalam table di atas diurutkan berdasarkan rata-rata skor nilai Prioritas 1 hingga Prioritas 4.



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

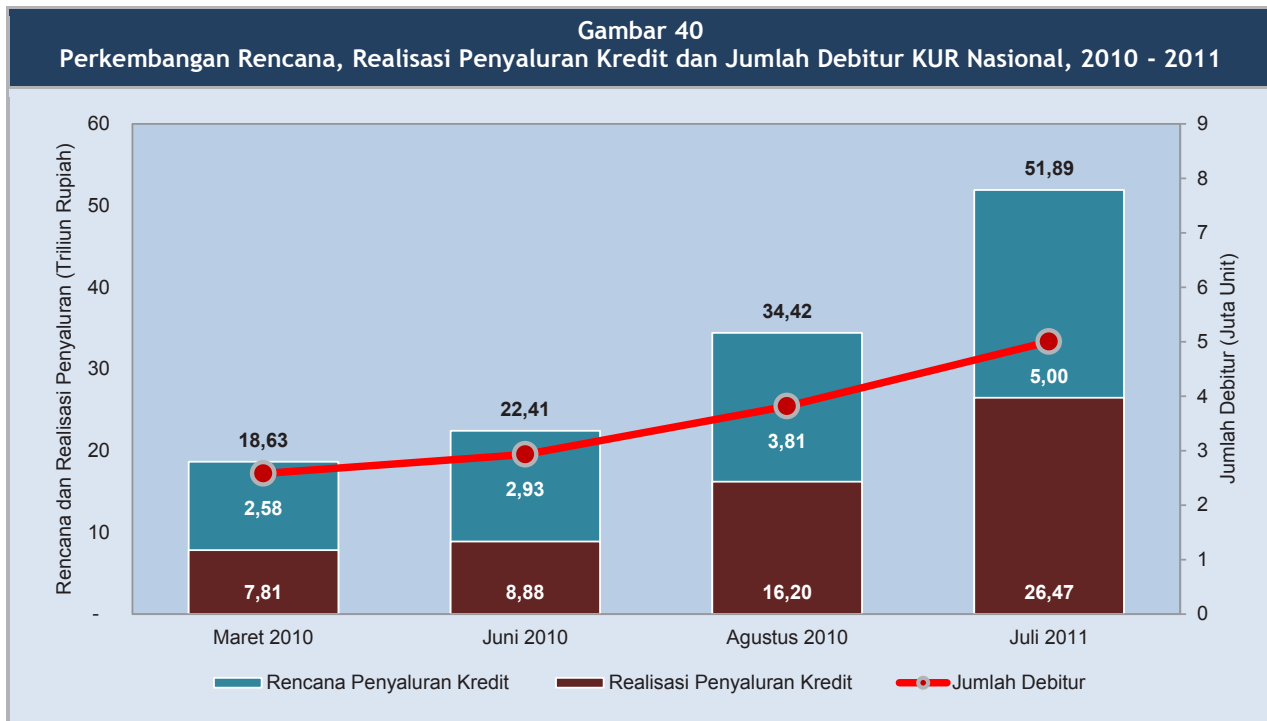


Tabel 12.  
Komposisi BLM PNPМ Mandiri Menurut Kabupaten/Kota (Juta Rupiah), Tahun 2011

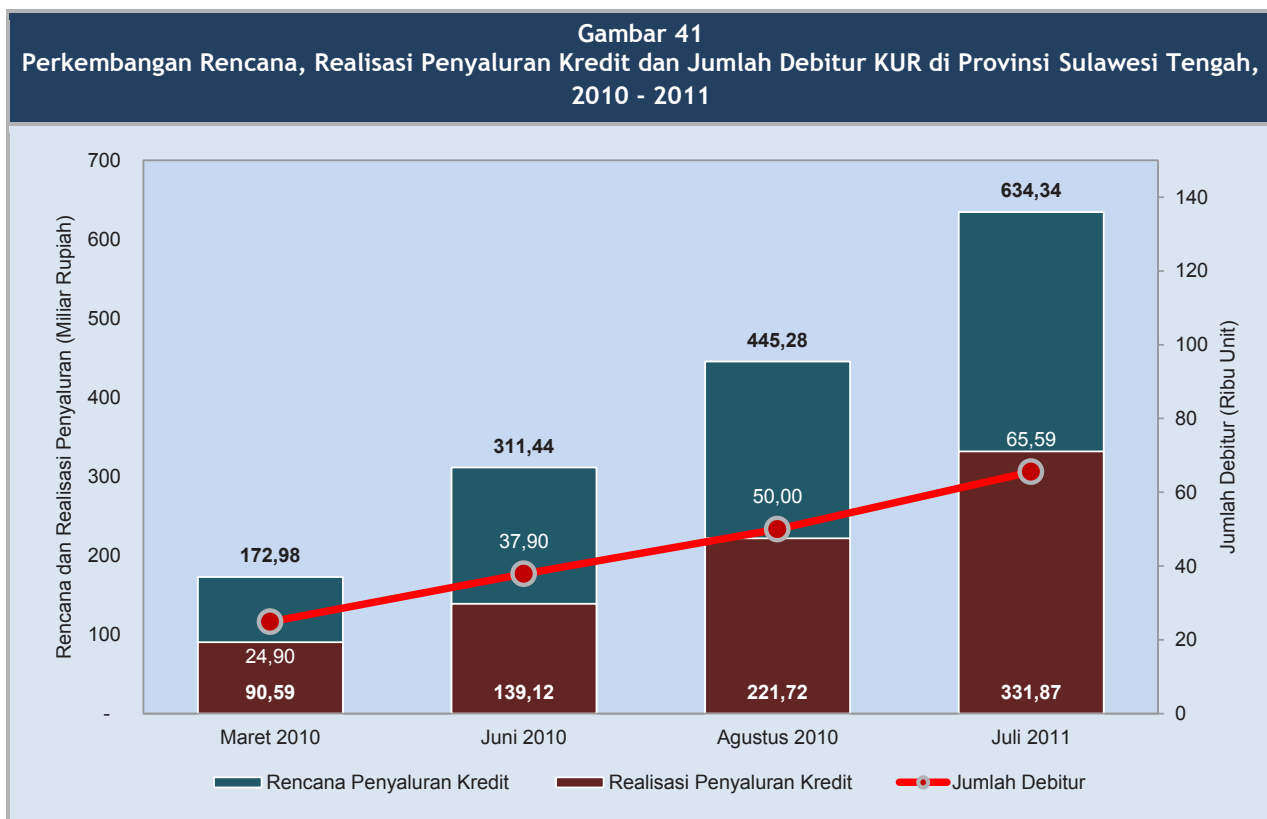
Daerah	PNPM Perdesaan	PNPM Perkotaan	PNPM DTK	Total Alokasi BLM	Sumber APBN	Sumber APBD	Jumlah Kecamatan
	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Juta Rp	Kec.
BANGGAI	6.750		3.500	10.250	8.900	1.350	13
BANGGAI KEPULAUAN	14.950			14.950	11.960	2.990	19
BUOL	10.250			10.250	8.200	2.050	11
DONGGALA	32.650			32.650	26.120	6.530	15
KOTA PALU		3.675		3.675	3.075	600	4
MOROWALI	12.000		3.500	15.500	13.100	2.400	13
PARIGI MOUTONG	26.250			26.250	21.000	5.250	20
POSO	19.250	625	3.500	23.375	19.400	3.975	18
SIGI	23.650			23.650	18.920	4.730	15
TOJO UNA UNA	14.850		3.500	18.350	15.380	2.970	9
TOLI TOLI	17.700	1.980		19.680	15.780	3.900	10
<b>SULAWESI TENGAH</b>	<b>178.300</b>	<b>6.280</b>		<b>198.580</b>	<b>161.835</b>	<b>36.745</b>	<b>147</b>

Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, 2011.

## KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

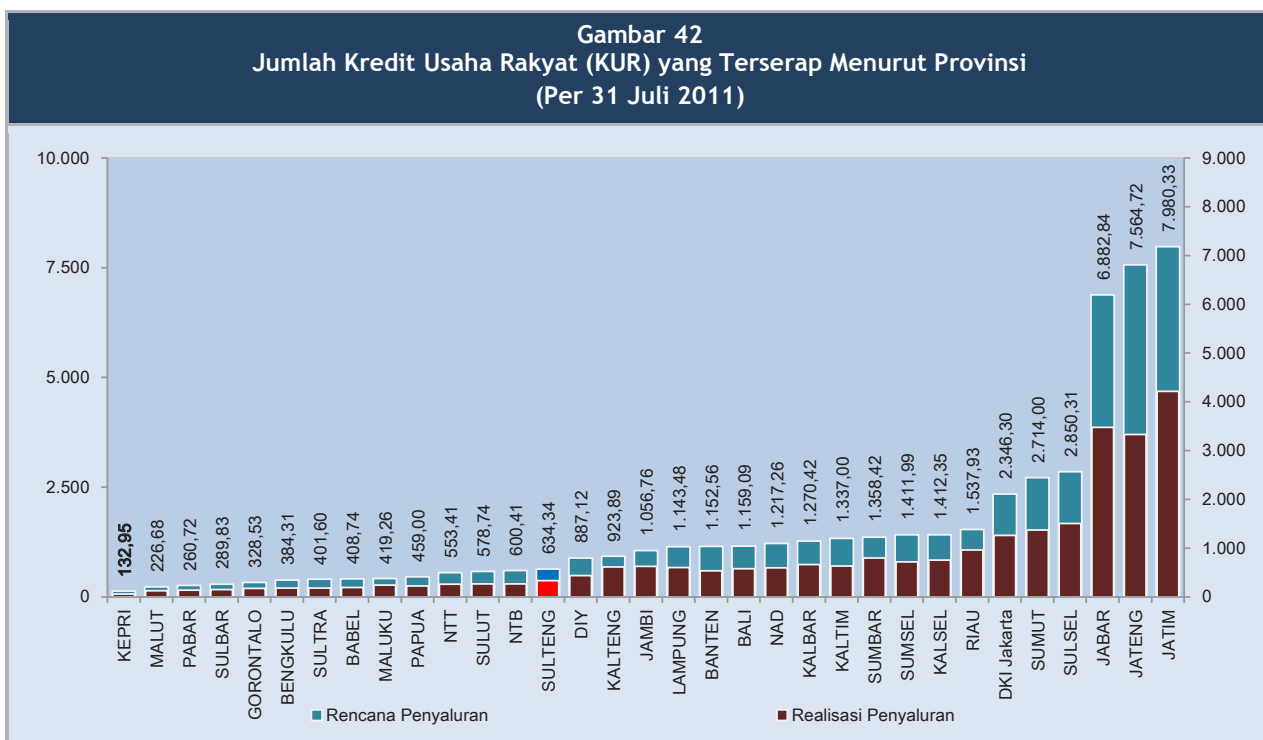


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

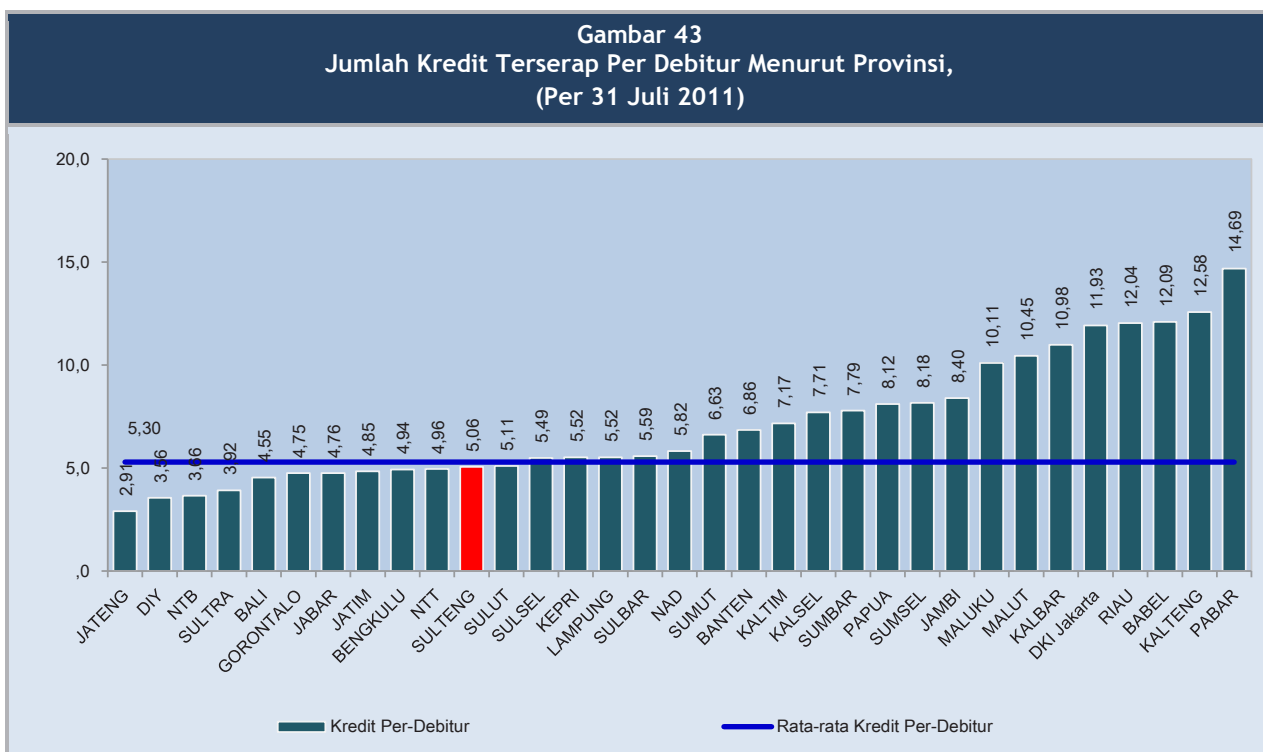


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

# KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

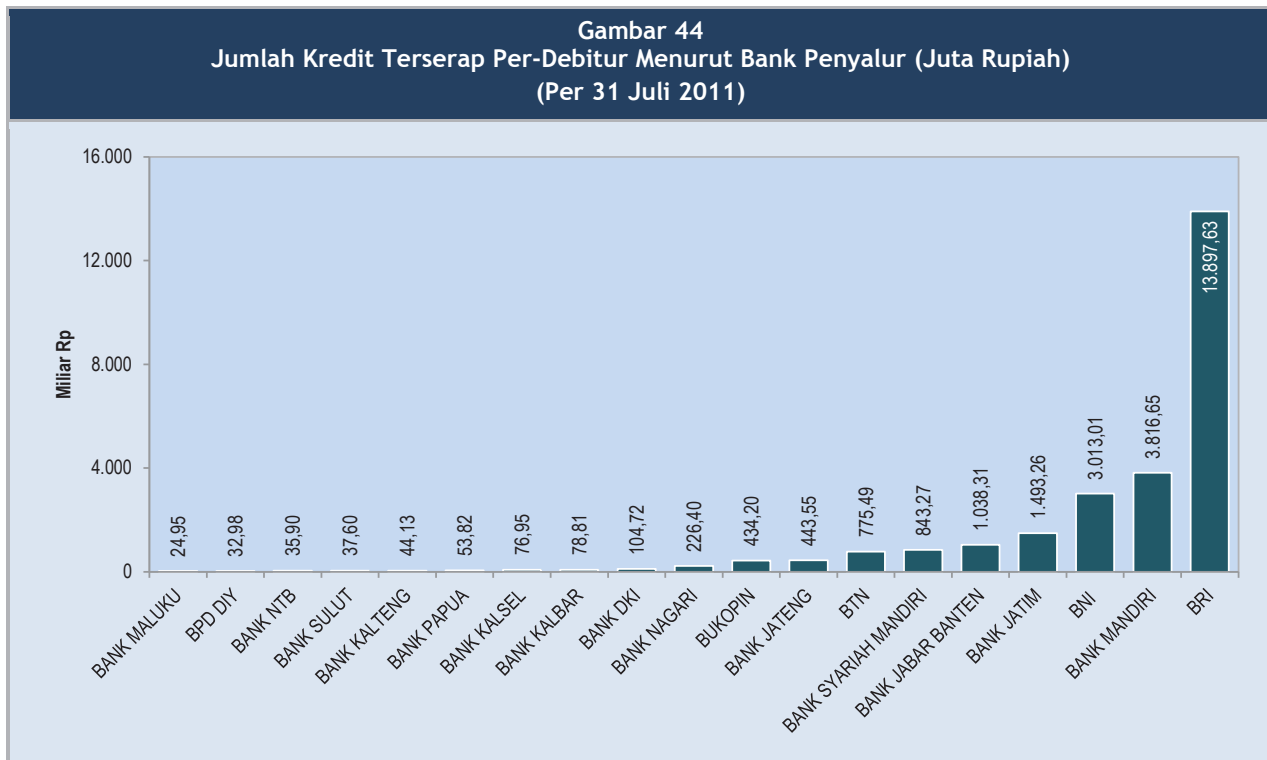


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

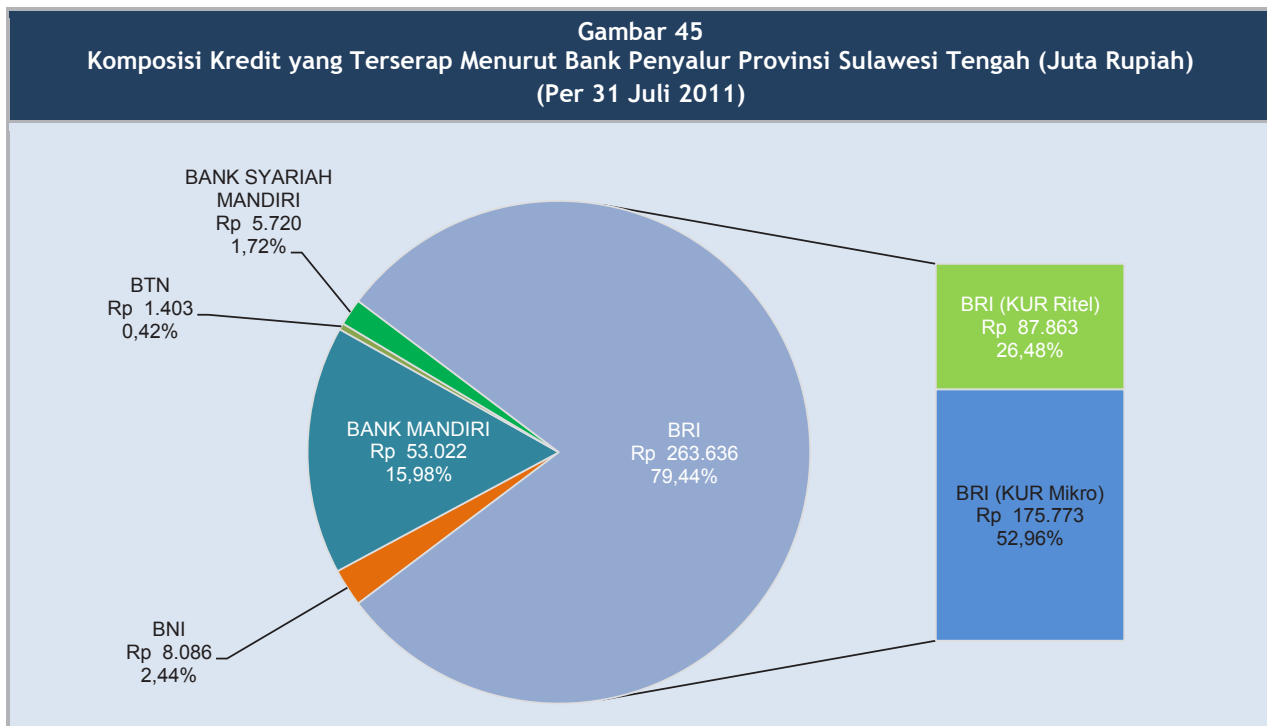


Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011

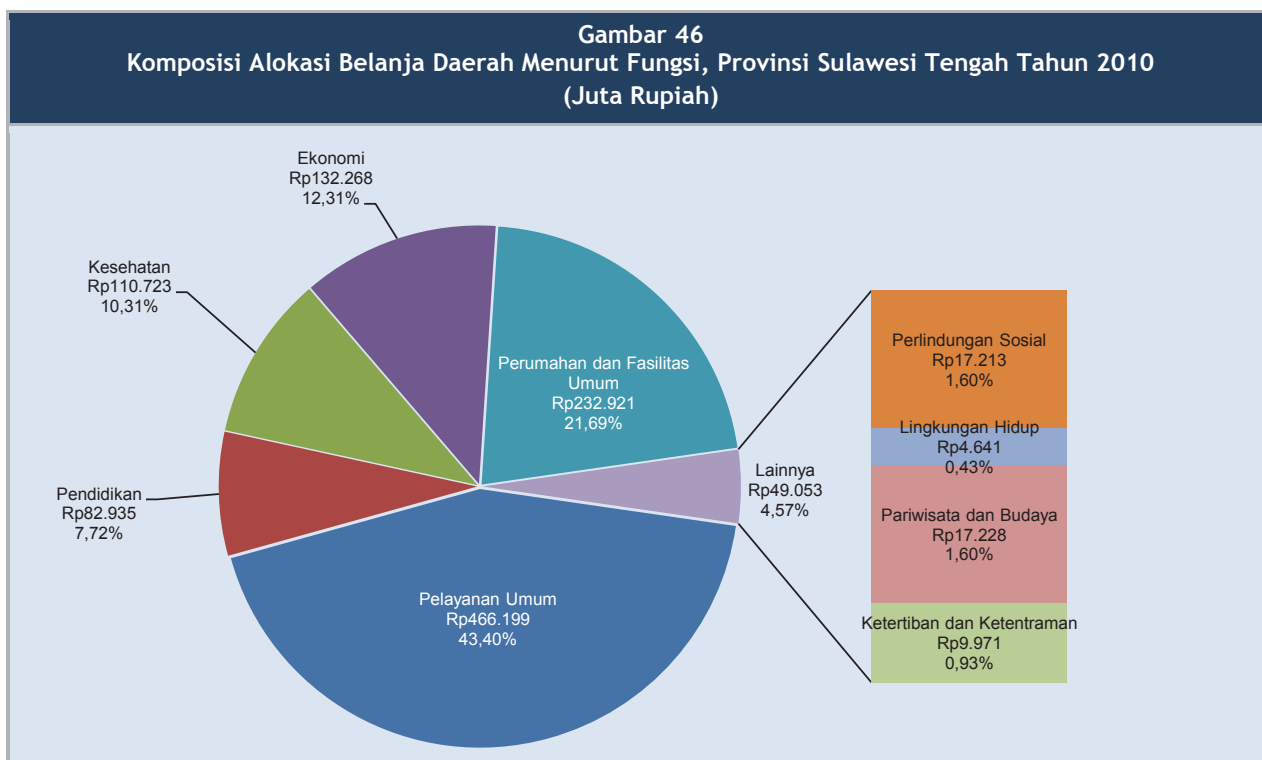
## KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)



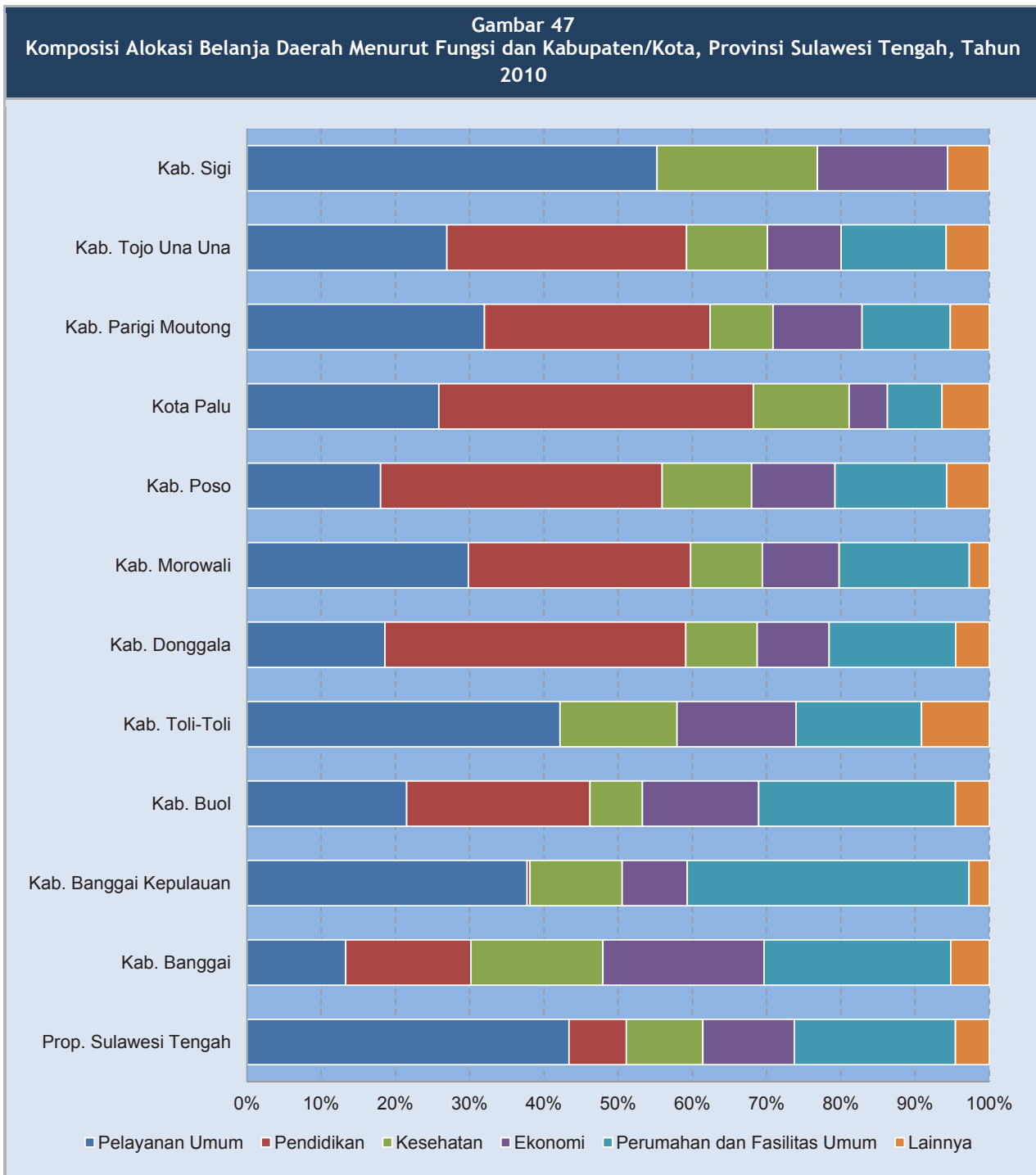
Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011



Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, 2011



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010



Sumber: Dirjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan, 2010

Keterangan: Komposisi Alokasi Belanja Daerah merupakan angka Anggaran Tahun 2010 (Bukan nilai realisasi).